

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan hukum yang dimiliki oleh desa sebagai fungsi usaha desa. BUMDesa di tiap desa memiliki nama dan jenis usahanya masing-masing. Melalui Bumdesa, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemberdayaan ekonomi lokal. BUM Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di desa, dengan dukungan penuh dari partisipasi masyarakat. PP Nomor 11/2021 yang baru diterbitkan memberikan legalitas yang kuat kepada BUM Desa sejak saat pembentukannya disetujui melalui musyawarah desa, dan juga mengembalikan peran dan fungsi utama BUM Desa sebagai penggerak utama dalam pemulihan ekonomi di lingkungan desa (Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan Bumdesa dengan kegiatan ekonomi dan sosial lainnya di desa masih cukup kompleks. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi, serta kurangnya keterampilan manajerial di tingkat desa menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui Bumdesa menjadi strategi utama dalam mengatasi tantangan tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan Bumdesa, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam mengembangkan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi dompet di tingkat desa. Menurut (Suryana, 2010), pemberdayaan pada dasarnya adalah proses menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perkembangan potensi masyarakat (enabling). Ini berarti bahwa potensi masyarakat harus diidentifikasi, diaktifkan, dan diperluas. Dengan perkembangan konsep ini, pemberdayaan melibatkan upaya untuk mengembangkan potensi

masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta memperluasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Winani, 1998) esensi dari pemberdayaan adalah memungkinkan pengembangan (*enabling*), memberdayakan potensi atau daya (*empowering*), dan mendorong terciptanya kemandirian. Pemberdayaan yang efektif memungkinkan masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam mengelola Bumdesa, meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal, serta mengembangkan inovasi di tingkat lokal.

Di sisi lain, modal sosial (*social capital*) juga berperan penting dalam memperkuat jaringan dan kerjasama antarwarga desa serta dengan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis. Jaringan sosial yang kuat antarwarga desa, dukungan dari pihak pemerintah daerah, dan kerjasama dengan lembaga keuangan dan pelaku bisnis lokal dapat memperkuat posisi Bumdesa dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal. Menurut Titioka et al., (2023), pengelolaan BUMDes yang baik dan profesional ditentukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu modal sosial. Pentingnya pemahaman dan penerapan elemen dasar modal sosial akan menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas operasional BUMDes, yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan kontribusi pendapatan awal desa dengan harapan pengentasan kemiskinan dan ekonomi pertumbuhan desa akan meningkat.

Tak dapat dipungkiri, peran kompetensi manajerial juga sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Bumdesa. Manajer Bumdesa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan, mengembangkan strategi pemasaran, mengoptimalkan produksi, serta membangun hubungan baik dengan stakeholders akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Bumdesa. Kemampuan manajerial yang baik akan

mempengaruhi efisiensi operasional, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi produk di Bumdesa.

Pada tahun 2024, terdapat 52.518 BUMDesa dan 5.529 BUMDesa Bersama, dengan total keseluruhan BUMDesa secara Nasional adalah 58.047 BUMDesa. Saat ini, di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat sejumlah BUM Desa yang tengah mengikuti proses pendaftaran atau perbaikan nama, dengan total sebanyak 0 unit. Sementara itu, sebanyak 67 BUM Desa telah berhasil diverifikasi namanya, menunjukkan komitmen dan langkah yang diambil dalam mengatur identitas dan legalitasnya. Selain itu, terdapat 4 BUM Desa yang sedang dalam proses pendaftaran badan hukum, menunjukkan upaya untuk memperkuat status hukumnya sebagai entitas bisnis yang sah. Selain itu, sebanyak 26 BUM Desa masih dalam proses perbaikan dokumen untuk memastikan kelengkapan administratif dan legalitasnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Jumlah Bumdesa dan Bumdesma di Kabupaten Kuar 2024

Sumber: [BUM Desa | Sistem Informasi Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

Di sisi lain, BUM Desa Bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami perkembangan yang positif. Tidak ada BUM Desa Bersama yang sedang dalam proses pendaftaran atau perbaikan nama atau dokumen. Sebanyak 5 BUM Desa Bersama telah diverifikasi namanya, menunjukkan konsistensi dalam identifikasi dan pengakuan sebagai entitas bersama. Satu BUM Desa Bersama sedang dalam proses pendaftaran badan hukum, sementara 3 lainnya telah berhasil berbadan hukum, mengindikasikan langkah-langkah konkret dalam mengatur legalitas dan kerangka kerja bersama untuk kegiatan ekonomi yang lebih besar dan terorganisir.

Dengan adanya data ini, dapat dilihat bahwa BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara sedang berada dalam berbagai tahap pengembangan dan legalisasi yang penting untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas usaha mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa. Diperlukan dukungan serta kebijakan yang mendukung untuk mempercepat proses legalisasi dan peningkatan kapasitas BUM Desa dan BUM Desa Bersama agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah.

Bumdesa di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi lokal. Mereka tidak hanya menjadi penggerak utama dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat desa. Selain itu, Bumdesa juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis lokal.

Selain Bumdesa, keberadaan Bumdesa Bersama juga menjadi fenomena menarik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bumdesa Bersama merupakan kumpulan Bumdesa yang bekerja sama dalam mengelola usaha bersama, seperti pengolahan hasil pertanian atau kerajinan,

pengembangan wisata desa, atau proyek berskala besar yang membutuhkan sinergi antar-Bumdesa. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kolaborasi dan koordinasi antarwarga desa dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan adanya data yang mencatat pertumbuhan jumlah Bumdesa dan Bumdesa Bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara, kajian kebijakan tentang integrasi Bumdesa menjadi semakin relevan dan mendesak. Pentingnya memahami dinamika, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh setiap Bumdesa dan Bumdesa Bersama dalam konteks integrasi dengan aktivitas ekonomi dan sosial lainnya di desa menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus mengoptimalkan peran Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan menggali lebih dalam tentang hubungan antara pemberdayaan, modal sosial, kompetensi manajer, integrasi Bumdesa, dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan kajian kebijakan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan potensi dan kesejahteraan desa-desa di wilayah tersebut.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat senantiasa diupayakan oleh pemerintah. Upaya tersebut adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan melalui integrasi BUMDes diharapkan dapat memecahkan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, dengan mengoptimalkan modal sosial dan kompetensi diharapkan kinerja BUMDes dapat lebih produktif. Untuk itu, disusun pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh social kepitall dan kompetensi manager terhadap pemberdayaan, integrasi BUMDesa, serta kesejahteraan masyarakat?

2. Bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap integrasi BUMDesa, serta kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh Integrasi BUMDesa terhadap kesejahteraan masyarakat?

### **1.2 Tujuan Kajian**

Adapun tujuan kajian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh social kapital dan kompetensi manager terhadap pemberdayaan,, integrasi BUMDes serta kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap integrasi BUMDesa, dan kesejahteraan masyarakat
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Integrasi BUMDesa terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Kajian**

1. Sebagai bahan masukan bagi OPD terkait dalam perumusan kebijakan dan evaluasi terkait integrasi BUMDesa.
2. Untuk memperkaya referensi hasil-hasil kelitbangan dalam lingkup pengembangan BUMDesa di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Sebagai sarana implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Riset Dan Inovasi Daerah dalam menyusun rekomendasi yang bersifat konkrit kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Perangkat Daerah yang membidangi BUMDesa.

### **1.5 Dampak Kajian**

Kegiatan kajian kebijakan integrasi BUMDesa di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki dampak yang signifikan secara singkat, antara lain:

1. Kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, peluang, dan potensi integrasi BUMDesa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kajian ini dapat memberikan solusi-solusi konkret dapat diidentifikasi untuk memperkuat integrasi BUMDesa dengan masyarakat desa dan lembaga terkait.

3. Hasil kajian dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan integrasi BUMDesa, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.
4. Kegiatan kajian dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan integrasi BUMDesa, sehingga implementasi kebijakan lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
5. Melalui kajian ini, kapasitas stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, BUMDesa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat ditingkatkan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi integrasi BUMDesa.
6. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan aktor ekonomi lokal seperti pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pasar lokal dalam mendukung integrasi BUMDesa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian kebijakan integrasi BUMDesa di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi saat ini, tetapi juga memberikan arah dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat integrasi tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 BUMDes**

Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, baik melalui percepatan pembangunan maupun pembentukan lembaga keuangan di daerah pedesaan, diantaranya adalah melalui BUMDes. BUMDes adalah lembaga ekonomi yang kini sedang digalakkan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (2) dijelaskan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes diperkuat oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan, seperti;

- 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, meliputi:
  - (a) Pasal 213
    - (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
    - (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (b) Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (c) Secara umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  - e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
  - f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
  - h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
  - i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
  - j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
  - k. melestarikan lingkungan hidup;
  - l. mengelola administrasi kependudukan;
  - m. melestarikan nilai sosial budaya;
  - n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan



langsung dengan BUMDes. Dalam arti diurnya desain BUMDes secara detail terdapat dalam berbagai ketentuan Permendagri ini.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

### **2.1.2 Pemberdayaan**

Pemerintah telah mengupayakan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan. (Wrihatnolo & Dwijdjowijoto, 2007) menjelaskan bahwa inisiatif untuk mengurangi kemiskinan paling sering menggunakan penerapan pemberdayaan. Secara konseptual, ada empat jalan strategis yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan, yaitu: meningkatkan kesempatan, memberdayakan masyarakat, mengembangkan kapasitas, dan menyediakan jaminan sosial..

Pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan pemihakan terhadap tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Untuk itu, diperlukan pemahaman bersama bahwa ekonomi kerakyatan memiliki akses langsung terhadap ekonomi masyarakat lapisan bawah. (Prawirokusumo, 2001) menyatakan bahwa memperkuat struktur ekonomi nasional dan memberdayakan usaha kecil dan menengah, khususnya koperasi, merupakan langkah yang sangat penting dan esensial dalam memprediksi masa depan ekonomi. Salah satu model pemberdayaan yang saat ini sedang digalakkan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melalui revolusi jagung. Pemberdayaan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan berusaha secara berkelanjutan. Pemberdayaan diartikan bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan diri sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya Shardlow dalam (Adi, 2008). Lebih lanjut Adi menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melibatkan lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Pemberdayaan berbagai macam bentuk dapat dipadukan dan saling melengkapi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat (Makmun, 2003) menyatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Upaya pemberdayaan ini menyangkut, antara lain peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, akses informasi, teknologi, pembangunan sarana prasarana fisik, pelatihan, dan sebagainya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Pendapat beberapa ahli menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses. Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti

pada suatu masa saja (Hogan, Rotter, Selignan, Hopson dan Scally dalam (Adi, 2008). Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan. Tujuannya agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengapatisasian, dan pendayaan (Wrihatnolo & Dwijdjowijoto, 2007).

### **2.1.3 Modal Sosial**

Modal sosial merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pemberdayaan. Modal sosial merupakan sebuah hubungan antar individu dalam suatu kelompok, antar kelompok yang memprioritaskan social, norma, nilai dan kepercayaan antar. Modal sosial dianggap sebagai hubungan antar kelompok masyarakat dengan yang lain, dalam (Syahra, 2003) dikatakan sebagai perekat sehingga dibutuhkan adanya kebersamaan dan kerjasama didalamnya.

Dalam tulisan Hanifan dalam (Syahra, 2003) modal sosial bukan hanya modal dalam arti harta kekayaan atau uang, melainkan asset atau modal nyata dalam hidup bermasyarakat (Ambardi & Prihawantoro, 2002) juga menjelaskan bahwa modal sosial mencakup nilai keluarga, komunitas dan berbagai organisasi yang menyatukan masyarakat.

Hubungan yang terjalin antar individu maupun kelompok dalam lingkungan masyarakat dapat memunculkan kemampuannya dalam bekerjasama agar dapat mencapai tujuan bersama. Proses mencapai tujuan ini tidak terlepas dari adanya kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat (Abdullah, 2013) pun mengemukakan dalam proses kerja

kolaborasi modal sosial menjadi energi dan kekuatan komunitas, disandarkan pada sifat dan substansi yang dimilikinya yakni kepercayaan, norma dan jaringan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hasil kerja kolaborasi modal sosial menghasilkan suatu energi positif seperti rasa tanggungjawab, kepedulian, kejujuran, kerjasama, inklusif, mutual trust, solidaritas, transparansi, perasaan aman dan nyaman. Dijelaskan pula berdasarkan tipologinya yang meliputi pengikat, perekat (*bonding social capital*), penyambung, menjembatani (*bridging social capital*) dan pengait, koneksi, jaringan (*linking social capital*). Hal-hal tersebut dapat memperlancar hubungan dan kerjasama, sehingga harapan-harapan individu dapat tercapai secara efisien dan efektif. (Syahra, 2003) juga memaparkan *bonding social capital* atau modal sosial pengikat secara tradisional pada nilai budaya yang ada di masyarakat terdapat keseimbangan antara modal sosial yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok. *Bridging social capital* bentuk modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnik lain, *Linking social capital* yaitu kesadaran untuk menunjukkan partisipasi aktif dan kontribusi optimal dari masing-masing stakeholder.

Menurut para Putnam dalam (Usman, 2018) terdapat beberapa komponen dalam modal sosial yaitu yang pertama *trust* (kepercayaan) nilai positif yang menghargai perkembangan atau prestasi. Kedua adalah norma sosial dan obligasi dan yang ketiga adalah jejaring sosial yang merupakan wadah kegiatan sosial. Tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut Fukuyama dalam (Usman, 2018) konsep penting yang membentuk modal sosial. Pertama adalah kepercayaan (*trust*) yang memiliki yang digunakan sebagai alat ukur tingkat modal sosial. Kedua, nilai dan norma (*value & norms*) sebagai prakondisi yang melatarbelakangi terbentuknya kepercayaan (*trust*). Ketiga, jejaring (*network*) berperan untuk menumbuhkan kepercayaan melalui interaksi yang terjalin.

#### **2.1.4 Kompetensi Manager BUMDes**

Pembangunan desa adalah salah aspek yang mendukung tercapainya pembangunan nasional. Dalam upaya tercapainya pembangunan desa perlu adanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bertujuan untuk membantuk usaha ekonomi desa agar dapat menambah hasil pendapatan desa. Selain itu keberadaan BUMDesa diharapkan dapat melihat peluang sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan. Keberlangsungan kegiatan ekonomi melalui dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDesa tidak lepas adanya peran sumber daya manusia. Dalam proses pengelolaannya sumberdaya yang mengatur manajemen BUMDesa harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan diharapkan dapat mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa.

Dalam kepengurusan ataupun pengorganisasian BUMDesa terdapat posisi penting dalam menggerakkan keberlangsungan usaha yang dijalankan terdiri dari direktur, sekretaris, dan bendahara. Hal yang perlu diperhatikan dalam BUMDesa yaitu sebagai pelaksana operasional, secara umum bertugas menjalankan kegiatan operasional BUMDesa dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang undangan yang telah berlaku dan wajib untuk melaksanakan prinsip-prinsip secara profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. Selain itu diakhir memberikan laporan tahunan kepada Lurah atau Kepala Desa tentang keadaan serta perkembangan BUMDesa dan usaha-usahanya yang teal dijalankan serta laporan keuangan.

Pada susunan struktur BUMDesa direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas hal-hal dan aktivitas BUMDesa. Bahkan direktur BUMDesa memiliki tanggung jawab mulai dari menyusun perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan,

manajemen dan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, beberapa poin yang menjadi kompetensi seorang Direktur BUMDesa *adalah*:

1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Memimpin dan mengelola serta mengurus Badan Usaha Milik Desa dan unit-unit usaha sesuai dengan AD/ART BUMDesa.
3. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari unit usaha yang ada pada BUMDesa.
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lain untuk mengembangkan usaha.
6. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris dan badan pengawas secara berkala.

#### **2.1.4 Konsep Integrasi**

Integrasi merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat yang kemudian menjadi satu kesatuan. Pengertian Durkheim perihal integrasi suatu hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan diperkuat oleh pengalaman (Torro et al., 2014). Dalam interaksi terdapat sekurang-kurangnya dua pihak selaku yang memberi tanggapan dan yang menerima tanggapan. Pada suatu proses integrasi terdapat individu atau kelompok yang melibatkan diri ke dalam masyarakat, dan masyarakat menerima individu tersebut, hal ini adanya timbal balik. Proses timbal balik yang terjadi tersebut didalamnya mengalami proses pembauran dan saling berhubungan yang menjadikan antar individu maupun kelompok satu kesatuan. Integrasi mencakup sikap, motivasi, perasaan dan pikiran dari banyak orang.

Proses timbal balik atau hubungan yang terjadi di masyarakat adalah suatu bentuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hubungan yang terjalin ini membawa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Duvender & Taneko dalam (Torro et al., 2014) menjelaskan bahwa suatu usaha membangun interdependensi yang lebih erat antara unsur masyarakat, sehingga tercipta keadaan yang harmonis terjalinnya kerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang disepati bersama. Salah satu bentuk atas hal tersebut yaitu meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut (Syukri et al., 2014) Intergrasi sebagai sebuah konsep pembangunan atas respon bertumbuhnya program-program pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal pada penelitian yang dilakukan oleh (Syukri et al., 2014) integrasi dikonsepsikan sebagai satu program pemberdayaan dengan yang lainnya, selain itu juga melihat sejauh mana dorongan stakeholder terhadap antarprogram yang ada. Integrasi sebagai program dapat dilakukan disetiap tingkatan wilayah, missal pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Secara konseptual integrasi terdiri dari tahapan dimulai dari perencanaan program pembangunan, pelaksanaan, pemantaun, evaluasi hingga pemeliharaan hasil pembangunan.

### **2.1.5 Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi akan kebutuhan hidupnya terpenuhi secara layak. Keadaan ini dapat terpenuhi dari segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan Kesehatan, maksud kesejahteraan demikian adalah sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2006). Mendukung pengertian tersebut dalam UU No. 11 tahun 2009 dijelaskan tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Merujuk pada (Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, dan Thompson, Suharto, (dalam Rofieq, 2011) pengertian kesejahteraan mengandung makna yaitu sebagai kondisi sejahtera sebagai pelayanan social, sebagai tunjangan sosial dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator yang berfungsi untuk mengetahui dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 terdapat 8 indikator kesejahteraan yaitu meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan dan sosial lainnya.

1. Kependudukan. Dalam indikator ini mencakup demografi yang meliputi pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan, rasio usia, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian.
2. Kesehatan dan gizi adalah indikator yang terkait terhadap pelayanan Kesehatan penduduk. Untuk mengukur derajat kesehatan penduduk antara lain angka kematian, angka kesakitan, dan angka harapan hidup. Selain itu juga dilihat melalui tingkat gizi dari pemenuhan gizi, ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan.
3. Pendidikan adalah indikator yang berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, dengan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan memiliki pengaruh besar dalam pembangunan. Aspek-aspek yang termasuk kedalam indikator Pendidikan seperti angka melek huruf, lama sekolah, partisipasi sekolah serta kesetaraan akses pendidikan.
4. Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Indikator kesejahteraan yang meliputi tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah. Dalam hal ini memperkecil tingkat pengangguran yang ada

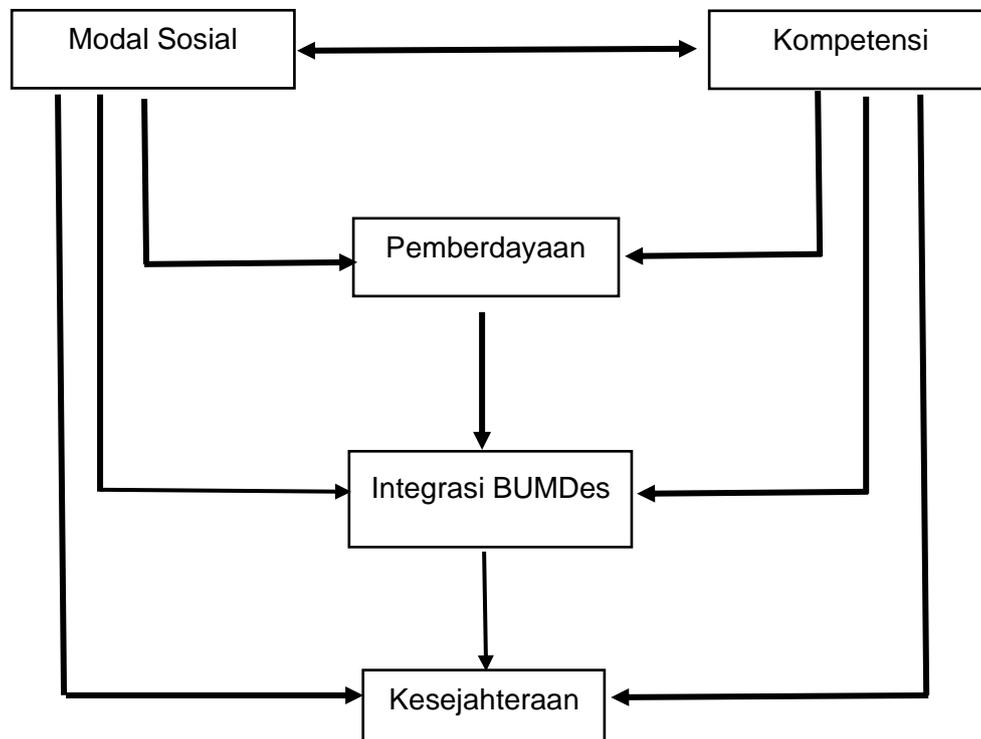
diharapkan membuka dan meningkatkan kesempatan kerja yang layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Taraf dan pola konsumsi, indikator ini meliputi pendapat yang menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat, karena dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang maupun jasa akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan.
6. Perumahan, merupakan indikator yang mencakup akses tempat tinggal yang layak, fasilitas sanitasi, dan akses air bersih.
7. Kemiskinan, untuk mengukur indikator ini yaitu dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makanan maupun bukan makanan. Selain itu juga diukur dari jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan pemerintah melibatkan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta akses pendidikan maupun kesehatan.
8. Sosial lainnya, indikator ini menjelaskan adanya perubahan taraf kesejahteraan rakyat dibidang sosial, seperti perubahan gaya hidup serta pola pikir. Indikator yang digunakan seperti penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Selain itu indikator fenomena sosial meliputi keadilan, keamanan, dan partisipasi masyarakat.

## **2.2 Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir digunakan sebagai alur peneliti untuk menggambarkan dasar-dasar pemikiran. Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah disampaikan akan dilakukannya penelitian terkait kajian Integrasi BUMDes terhadap kesejahteraan. Melalui modal sosial yang dianggap sebagai komponen adanya saling percaya, kebersamaan dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial memegang peran dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu dalam hubungannya dengan pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar anggota masyarakat. Adapun peran BUMDes sebagai lembaga melalui pemberdayaan dapat mengembangkan modal sosial

sehingga mampu mengelola dengan baik guna membantu meningkatkan perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Kajian

### 2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

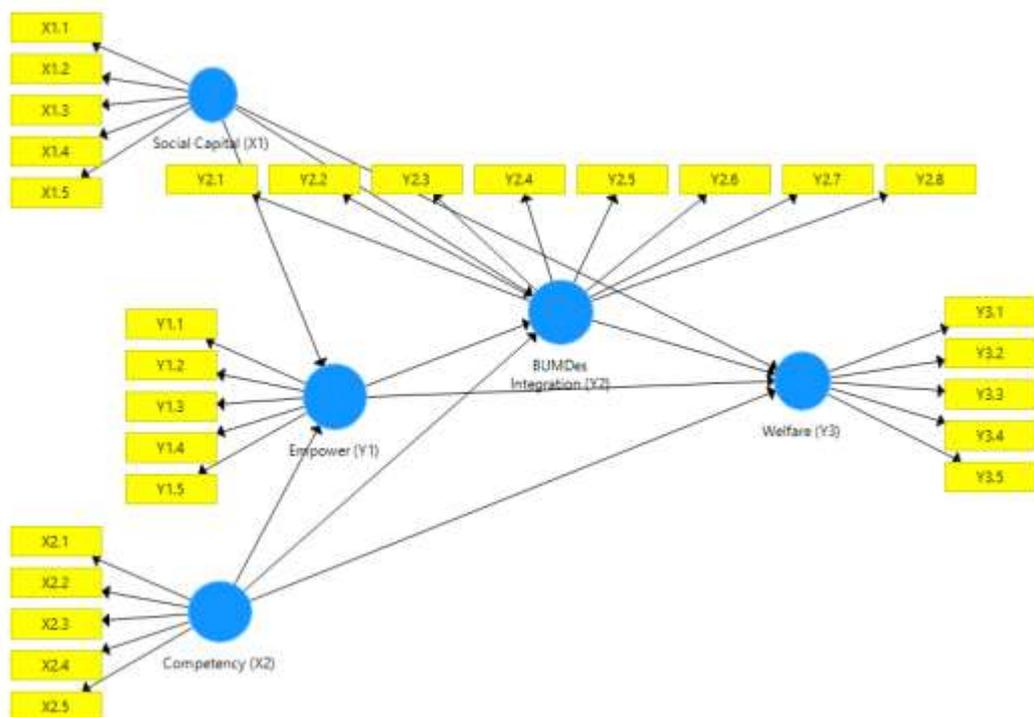
Mengacu pada kerangka pikir, kajian teoritis dan empiric selanjutnya disusun kerangka konseptual kajian dan hipotesis kaji. Kerangka Konseptual disajikan pada Gambar 2.2.

#### Hipotesis:

Berdasarkan Kerangka konseptual, selanjutnya diajukan hipotesis sebagai berikut ini.

1. Sosial Kapital (X1) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan (Y1)
2. Sosial Kapital (X1) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap integrase BUMDes (Y2)

3. Sosial Kapital (X1) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan (Y3)
4. Kompetensi manager (X2) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan (Y1)
5. Kompetensi manager (X2) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap integrase BUMDes (Y2)
6. Kompetensi manager (X2) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan (Y3)
7. Pemberdayaan (Y1) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap integrase BUMDes (Y2)
8. Pemberdayaan (Y1) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan (Y3)
9. integrase BUMDes (Y2) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan (Y3)



Gambar 2.2 Kerangka Konsepsional Kajian

Sumber: Berbagai sumber yang dimodifikasi peneliti, 2024

## **BAB III**

### **METODE KAJIAN**

#### **3.1 Rancangan Kajian**

Rencana atau kerangka kerja dibuat untuk memungkinkan diperolehnya jawaban atas pertanyaan penelitian dikenal sebagai desain penelitian (Kerlinger, 2006). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji integrasi BUMDes Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Menurut (Bungin, 2010) format deskriptif berusaha untuk mengklarifikasi, meringkas, atau menjelaskan berbagai keadaan, kondisi, atau variabel yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Selain itu, menurut Kuncoro (2009), pengumpulan data merupakan bagian dari penelitian deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan terkini dari topik penelitian.

#### **3.2 Waktu dan Lokasi Kajian**

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas dua puluh kecamatan. Kecamatan tersebut memiliki sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun tidak. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua unsur masyarakat termasuk BUMDes di dalam pengelolaannya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tiga bulan mulai Maret dengan Agustus 2024, yang meliputi BUMDes di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, dan Kota Bangun.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian adalah seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti pejabat pengambil kebijakan di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, para tokoh masyarakat kecamatan. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang mewakili masyarakat di beberapa BUMDes, yakni kepala

desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Sampel ditentukan secara sengaja yang ditentukan untuk masing-masing BUMDes di kecamatan contoh yang berjumlah 107 orang. Metoda ini digunakan dengan menentukan sampel secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan khusus bahwa para pejabat dan tokoh masyarakat telah banyak berkecimpung pada BUMDes.

### **3.4 Definisi Operasioanal dan Pengukuran**

Variabel yang digunakan meliputi variable endogen dan eksogen. Variabel eksogen meliputi; social kapital (X1) dan kompetensi manager BUMDes (X2). Variabel indogen meliputi; Pemberdayaan (Y1), integrasi BUMDes (Y2) dan Kesejahteraan masyakat (Y3).

Pengukuran variabel-variabel dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator sebagai pengukurnya. Selanjutnya diukur dengan menggunakan skala yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Setiap item kuesioner berisi pernyataan atau pertanyaan mengenai indikator-indikator tersebut. Menurut (Johnson & Christensen, 2008), kuesioner adalah sebuah laporan instrumen pengumpulan data diri yang diisi oleh peserta penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dalam bentuk pernyataan, pertanyaan tertutup, dan pertanyaan terbuka. Instrumen yang berupa kuesioner dikembangkan dalam skala Likert (Sugiyono, 2017). Selanjutnya setiap variabel dikembangkan ke dalam bentuk pernyataan yang mencerminkan sikap persepsi responden, yakni (a) sangat setuju/sangat baik/sangat bermanfaat diberi skor 5, (b) setuju/baik/bermanfaat diberi skor 4, (c) cukup setuju, cukup baik/kadang-kadang/sedang diberi skor 3, (d) kurang setuju/kurang baik/kurang bermanfaat diberi skor 2, dan (e) tidak setuju/tidak baik/tidak bermanfaat skor 1. Pengukuran bertujuan agar diperoleh informasi kualitas dari variabel-variabel dalam bentuk kontinum nilai total terendah (sama dengan jumlah indikator) dan nilai total tertinggi (sama dengan jumlah skor maksimum).

- 1) Kesejahteraan adalah adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, baik yang bersifat material maupun nonmaterial yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga petani, dan didukung oleh lingkungan social pada wilayah kerja BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kesejahteraan masyarakat (Y3) diukur dengan indicator; pendapatan (Y31), kepemilikan aset (Y32), tingkat Pendidikan (Y33), tingkat kesehatan (Y34), dan hubungan sosial (Y35)

- 2) BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, (BUMDes) adalah badan usaha yang terletak pada desa tertentu yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Integrasi merupakan penyatu paduan, mempersatukan atau menggabungkan. Integrasi adalah proses mempersatukan atau memadupadankan nilai-nilai yang menjadikan suatu aspek harmonis didalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi BUMDes (Y2) diukur dengan indicator; sikap manager BUMDes terhadap perlunya integrasi BUMDes (Y21), motivasi positif untuk melaksanakan integrase BUMDes (Y22), perencanaan integrase BUMDes (Y23), pelaksanaan integrase BUMDes (Y24) dan penilaian integrase BUMDes (Y25).

- 3) Pemberdayaan masyarakat (Y1) adalah pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, memberdayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat yang berada di wilayah kerja BUMDes. Tiga unsur yang terpenting dalam pemberdayaan adalah penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Pemberdayaan diukur dengan indicator; penyadaran akan pentingnya BUMDes (Y11), penyadaran agar segera melaksanakan integrase

BUMDes untuk meningkatkan produktivitas (Y12), memberikan bimbingan BUMDes untuk perencanaan integrasi BUMDes (Y13), Memberikan latihan pelaksanaan integrasi BUMDes (Y14), dan memberdayakan BUMDes pada tatantan integrasi untuk semua aspek perkenomioian Desa melalui unit usahanya (Y15)

- 4) Kompetensi manager BUMdes adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak yang mendasari dan merefleksikan wujud perilaku dan produktivitas manager, yaitu kemampuan teknis tentang pengelolaan BUMDes yang berbasis teknologi unggulan.

Kompetensi manager BUMDes (X2) diukur dengan kemampuan teknis tentang pengelolaan BUMDes yang berbasis teknologi unggulan (X21), pengetahuan manager terhadap bisnis BUMDes yang berorientasi profit (X22), pengalaman dalam mengelola bisnis (X23), motivasi untuk meningkatkan produktivitas BUMDes agar tercapai tujuan yang ditetapkan (X24), dan manager memiliki perilaku tentang tindakan mengelola BUMDes yang berkelanjutan (X25).

- 5) Sosial Kapital adalah modal non materiil yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya yang berupa adanya saling percaya, norma-norma sebagai pijakan hidup sehari hari, adanya kerjasama dan adanya jaringan social yang terus bertumbuh.

Modal social (X1) diukur dengan indicator; membangun kepercayaan di dalam masyarakat dalam mengelola BUMDes (X11), Manager BUMdes mendorong meningkatkan kesejahteraan (X12), bersama-sama memelihara keberlanjutan BUMDes (X13), dilaksanakan musyawarah (X14), dan mempunyai aturan/adat kebiasaan di dalam bergotong royong untuk keberlanjutan BUMDes (X15).

### **3.5 Instrumen Kajian**

Instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner (wawancara terstruktur) (Sugiyono, 2012). Instrumen yang disusun peneliti berdasarkan kajian literatur

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah data pendapat/sikap terhadap BUMDes. Pengumpulan data primer dilakukan oleh tim peneliti sendiri melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara mendalam pada semua pemangku kepentingan/responden yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Di samping itu, data yang telah dimiliki oleh lembaga lain, seperti BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BAPPEDA), BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara, dan data dari instansi terkait.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi kuesioner/angket, wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut.

#### 1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dalam rangka mendukung studi kuantitatif. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti terkait dengan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012). (Kerlinger, 2006) mengemukakan bahwa dalam wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah.

#### 2) Observasi nonpartisipasi dan tak berstruktur

Observasi nonpartisipasi adalah peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi tak berstruktur bertujuan untuk mengembangkan fokus observasi dan merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara

sistematik, yakni tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2012). Observasi yang dilakukan meliputi kegiatan yang dilaksanakan, orang-orang yang melaksanakan aktivitas BUMDes dan tempat kegiatan.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan meliputi dokumen Kutai dalam angka, Kecamatan dalam angka, profil kecamatan, profil BUMDes dan sebagainya, serta gambar/foto terkait dengan BUMDes dan kegiatan yang dilaksanakan.

## 3.7 Teknik Analisis

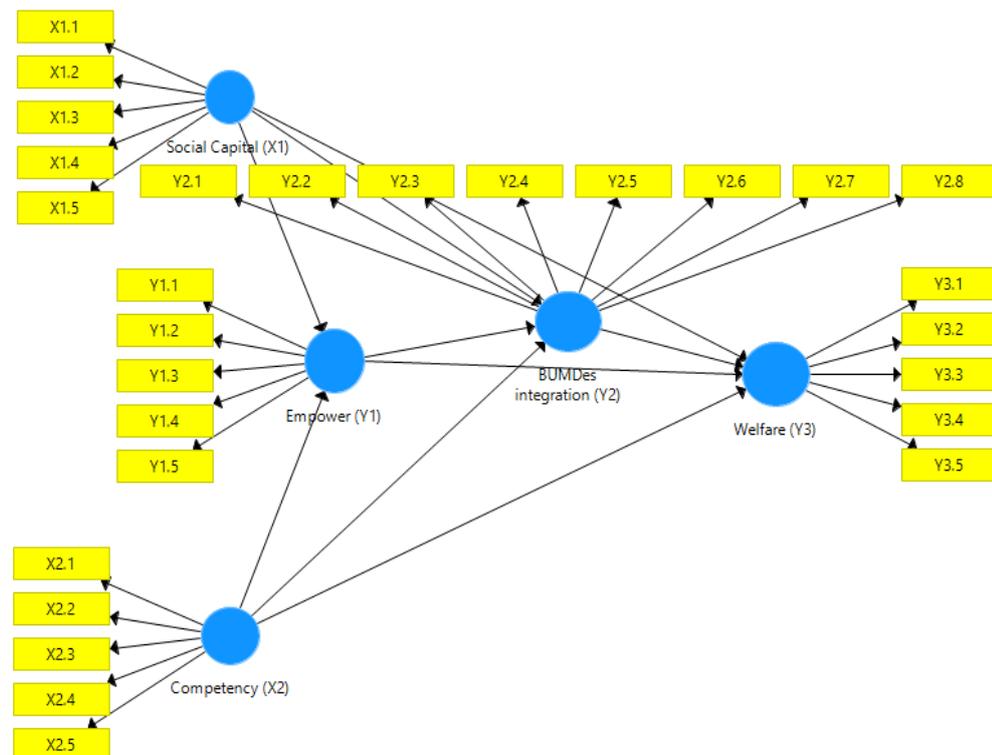
### 1) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial dengan uji statistik. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan kajian ini. Untuk kepentingan pengujian secara statistik, hasil pengukuran variabel menggunakan indikator-indikator yang menghasilkan skala nominal atau ordinal ditransformasi supaya berbentuk nilai skala interval, bahkan skala rasio.

Pengolahan data menggunakan program SPSS 26 dan model *Structural Equation Modeling* (SEM) program SmartPLS versi 3 digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan pada kajian ini. SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antarvariabel yang ada pada sebuah model, baik antara indikator dan konstraknya maupun hubungan antarkonstruk.

Analisis kuantitatif merupakan teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial dengan uji statistik. Analisis kuantitatif digunakan untuk

menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk kepentingan pengujian secara statistik, hasil pengukuran variabel menggunakan indikator-indikator yang menghasilkan skala nominal atau ordinal ditransformasi supaya berbentuk nilai skala interval, bahkan skala rasio. Adapun model dalam kajian ini adalah:



Gambar 2.1 Model Pengujian hipotesis

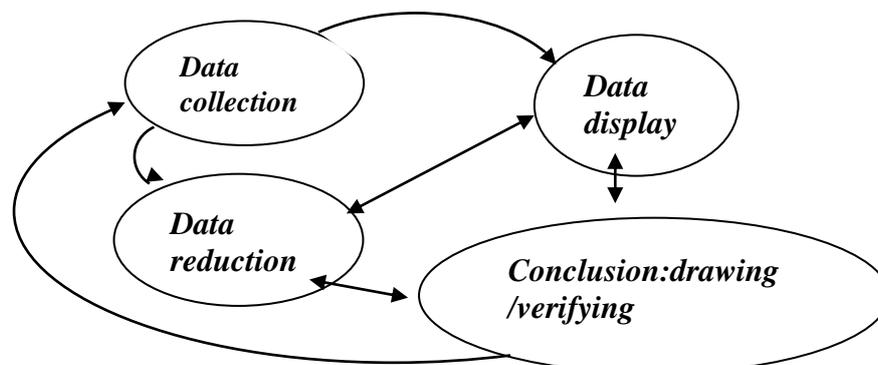
Sumber: Berbagai sumber yang dimodifikasi peneliti, 2024

## 2) Analisis Kualitatif

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2012b). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa analisis terhadap data yang telah

dikumpulkan selanjutnya dirangkum, kemudian disajikan, disimpulkan, dan diverifikasi secara bersamaan. Pada penelitian ini analisis data dengan pendekatan kualitatif meliputi analisis sebelum di lapangan, analisis di lapangan, dan analisis setelah di lapangan dijelaskan sebagai berikut.

- a) Analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian bersifat sementara dan dapat berubah tergantung pada fenomena yang dijumpai di lapangan.
- b) Analisis data di lapangan. Analisis dilakukan secara langsung terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila setelah dianalisis menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh informan belum memuaskan, maka pertanyaan dilanjutkan lagi sampai diperoleh data yang kredibel. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012b), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction* (merangkum data, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya), *data display* (penyajian data dengan teks yang bersifat naratif), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan simpulan dan verifikasi yang merupakan temuan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif). Selanjutnya aktivitas dalam analisis data sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Komponen dalam Analisis Data  
Sumber: (Sugiyono, 2012)

- c) Analisis setelah di lapangan. Analisis setelah di lapangan dengan tema kultural (*discovering cultural themes*) merupakan upaya mencari benang merah, yaitu mencari hubungan antardomain dan hubungan keseluruhan sesuai dengan fokus analisis (Sugiyono, 2012b).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

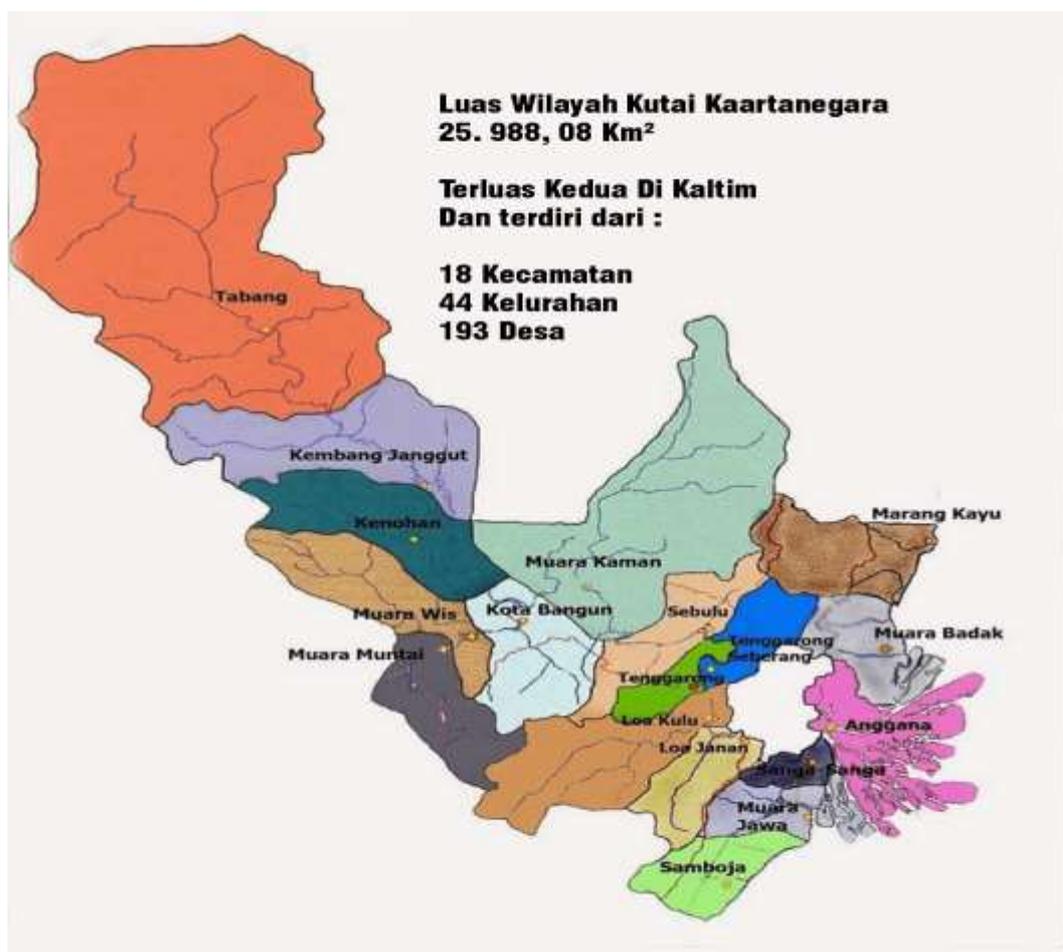
#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kutai Kartanegara adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan luas total mencapai 27.263,10 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak pada koordinat geografis antara 115°26' hingga 117°36' Bujur Timur dan 1°08' hingga 1°28' Lintang Selatan. Pada awalnya, Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan, namun seiring waktu, beberapa kecamatan telah dimekarkan. Misalnya, Kecamatan Samboja kini terbagi menjadi Kecamatan Samboja Induk dan Kecamatan Samboja Barat. Begitu pula dengan Kecamatan Kota Bangun yang kini terbagi menjadi Kecamatan Kota Bangun dan Kota Bangun Darat. Dengan demikian, saat ini Kutai Kartanegara memiliki total 20 kecamatan.

Kabupaten ini memiliki banyak sungai yang mengalir di hampir semua kecamatannya, menjadikannya jalur transportasi utama selain angkutan darat. Sungai terpanjang adalah Sungai Mahakam yang membentang sekitar 920 kilometer. Batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di utara, Selat Makassar di timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di selatan, serta Kabupaten Kutai Barat di barat. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sekitar 16 danau, dengan Danau Semayang sebagai yang terluas, mencakup area sekitar 13.000 hektar.

Kutai Kartanegara memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Data menunjukkan bahwa curah hujan di setiap kecamatan berbeda-beda setiap bulannya. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Mei dengan 291 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 14 hari, sementara bulan dengan curah hujan terendah adalah Maret dengan 123 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 8 hari.

Menurut data terakhir, jumlah penduduk Kutai Kartanegara mencapai 788.113 jiwa pada akhir tahun 2023. Sebagian wilayah Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Samboja, akan menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Kabupaten Kutai Kartanegara juga dikenal dengan keberagaman budaya dan sumber daya alamnya, termasuk potensi tambang dan energi. Kabupaten ini memiliki sejumlah objek wisata alam dan budaya, seperti Taman Nasional Kutai dan berbagai situs sejarah peninggalan Kerajaan Kutai. Infrastruktur dan fasilitas publik terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4.1  
Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

#### **4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Loa Kulu**

Kecamatan Loa Kulu mencakup area seluas 1.405,7 km<sup>2</sup> dan memiliki populasi sebesar 59.672 jiwa. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari 12 desa. Terletak pada koordinat 116°29' BT - 117°03' BT dan 0°26' LS – 0°54' LS, Loa Kulu kini mencakup 15 desa setelah beberapa desa mengalami pemekaran.

Desa Loh Sumber dipecah menjadi Desa Loh Sumber dan Desa Sumber Sari. Desa Loa Kulu Kota dibagi menjadi Loa Kulu Kota dan Jongkang, sedangkan Desa Rempanga menjadi Desa Rempanga dan Desa Sepakat. Dari seluruh desa yang ada, Desa Sungai Payang memiliki wilayah terluas, yaitu 416,9 km<sup>2</sup> atau 29,66% dari total luas Kecamatan Loa Kulu. Sebaliknya, desa hasil pemekaran, Lung Anai, adalah yang terkecil dengan luas 1,1 km<sup>2</sup> atau hanya 0,08% dari total luas kecamatan. Luas wilayah tiga desa baru masih dihitung sebagai bagian dari desa induknya.

Dengan wilayah yang luas, jarak tempuh antar desa di Kecamatan Loa Kulu cukup jauh dari ibukota kecamatan, dan juga dari satu desa ke desa lainnya. Jika diukur dari Desa Loa Kulu Kota sebagai pusat kecamatan, Desa Jonggon Desa adalah yang terjauh dengan jarak 77 km, diikuti oleh Desa Jonggon Jaya dengan jarak 58 km. Desa terdekat dari ibukota kecamatan adalah Desa Ponoragan dan Desa Loa Kulu Kota sendiri, keduanya berjarak kurang dari 1 km karena berbatasan langsung dengan desa tersebut.

#### **Penduduk**

Pada tahun 2022, Kecamatan Loa Kulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 56.492 jiwa, berdasarkan data registrasi penduduk setempat. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki sebanyak 29.449 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.043 jiwa. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk sementara, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Loa Kulu adalah 13 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Jembayan Tengah dan Lung Anai, dengan masing-

masing 456 jiwa/km<sup>2</sup> dan 450 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, Desa Sungai Payang memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 8 jiwa/km<sup>2</sup>.

Rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, di Kecamatan Loa Kulu menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah 29.449 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 27.043 jiwa, menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 109.



Gambar 4.2  
Jumlah Penduduk Kecamatan Loa Kulu

#### 4.1.3. Gambaran Umum Kecamatan Marang kayu

Kecamatan Marangkayu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah mencapai 866,20 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini terdiri dari 11 desa, yaitu Desa Perangat Baru, Desa Bunga Putih, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa Sebuntal, Desa Kersik, Desa Santan Ilir, Desa Santan Tengah, Desa Santan Ulu, Desa Sambera Baru, dan Desa Semangkok.

Ibukota kecamatan terletak di Desa Sebuntal. Dari semua desa tersebut, Desa Perangat Baru adalah desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan dengan jarak tempuh 35 kilometer, sementara Desa Bunga Putih adalah desa yang paling dekat dengan ibukota kecamatan, hanya berjarak 4 kilometer. Seluruh desa di Kecamatan Marangkayu dapat dijangkau melalui jalan darat. Secara geografi, Marangkayu memiliki potensi alam yang kaya, termasuk dalam sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kecamatan ini juga memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti pantai-pantai yang belum banyak terekspos. Infrastruktur di Marangkayu terus berkembang dengan adanya pembangunan jalan dan fasilitas umum yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial budaya masyarakat Marangkayu juga beragam, dengan berbagai tradisi dan kebiasaan lokal yang masih dijaga hingga saat ini. Beragam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil menengah turut menjadi penopang kehidupan masyarakat di kecamatan ini.

### **Penduduk**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Marangkayu memiliki jumlah penduduk sekitar 28.685 jiwa pada tahun 2022 yang terdiri dari 14.809 penduduk laki-laki dan 13.876 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk menunjukkan bahwa terdapat 107 jiwa laki-laki per setiap 100 jiwa perempuan. Desa Sebuntal memiliki populasi terbanyak dengan 6.425 jiwa, sementara Desa Perangat Baru memiliki populasi terendah dengan 1.058 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kecamatan Marangkayu adalah 33 jiwa per kilometer persegi. Desa Kersik memiliki kepadatan tertinggi dengan 284 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Desa Santan Ulu memiliki kepadatan terendah dengan 9 jiwa per kilometer persegi. kecamatan ini.



Gambar 4.3  
Jumlah Penduduk Kecamatan Marangkayu

#### 4.1.4. Gambaran Umum Kecamatan Kota Bangun

Kota Bangun merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 82 Km perjalanan darat dari Tenggarong, ibu kota kabupaten Kutai Kartanegara ke utara. Pusat pemerintahannya berada di Desa Kota Bangun Ulu. Kecamatan Kota Bangun terletak antara  $116^{\circ}27'$  BT –  $116^{\circ}46'$  BT dan  $0^{\circ}07'$  LS –  $0^{\circ}36'$  LS dengan luas wilayah mencapai 1.143,74 km<sup>2</sup>. Sebagian wilayah kecamatan Kota Bangun dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan serta terletak di tepi Danau Semayang dan Danau Melintang. Pola penyebaran penduduknya pun terkonsentrasi di sepanjang sungai maupun danau tersebut.

Kecamatan Kota Bangun memiliki iklim tropis basah. Curah hujan perbulannya rata-rata 215,25 mm dan rata-rata hari hujan berkisar 16 hari perbulan pada tahun 2022. Januari tercatat memiliki curah hujan tertinggi yaitu sebanyak 356 mm dengan 13 hari hujan dalam satu bulan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata sebanyak 80 mm dengan 12 hari hujan dalam sebulan.

Kecamatan Kota Bangun, dengan luas wilayah yang cukup besar dan topografi yang beragam, memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi geografis dan iklim ini mendukung berbagai aktivitas

pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Infrastruktur di wilayah ini terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.

### **Penduduk**

Penduduk Kecamatan Kota Bangun tercatat sebanyak 25.029 jiwa pada tahun 2022 yang terdiri dari 12.907 jiwa laki-laki dan 12.122 jiwa perempuan yang tersebar pada 11 desa. Rasio jenis kelamin secara keseluruhan adalah 106,48 dimana dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Kota Bangun Ulu yang mencapai 6.071 jiwa sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Pela dengan jumlah penduduk 571 jiwa dan desa Sebelimbingan dengan jumlah penduduk 571 jiwa.

Kepadatan penduduk rata-rata di Kecamatan Kota Bangun sekitar 60 orang per kilometer persegi atau 18 rumah tangga per kilometer persegi. Desa dengan jumlah penduduk terpadat adalah Desa Kota Bangun Ilir dengan rata-rata kepadatan penduduk 879 orang per kilometer persegi atau 275 rumah tangga per kilometer persegi.



Gambar 4.4  
Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun

#### **4.1.5. Gambaran Umum Kecamatan Sebulu**

Wilayah Kecamatan Sebulu secara geografis terletak di daerah khatulistiwa dan berada pada posisi antara 116039' BT – 115045'BT dan 003' LS –0033'LS. Secara administrative batas wilayahnya yaitu Sebelah Utara Kecamatan Marangkayu, Sebelah Timur Kecamatan Tenggara, Sebelah Selatan Kecamatan Kota Bangun dan Sebelah Barat Kecamatan muara Kaman dengan luas wilayah mencapai 859,50 kilometer persegi.

Kecamatan Sebulu terdiri dari 14 Desa. Desa terbaru yaitu desa Mekar Jaya yang merupakan pecahan dari desa Sumber Sari. Dari kesemua desa yang ada yang paling luas wilayahnya saat ini yaitu desa Beloro dengan luas 142,50 km<sup>2</sup> atau 16,58% dari luas kecamatan Sebulu, sedangkan desa dengan luas paling kecil yaitu kelurahan Segihan dengan luas wilayahnya yang hanya 15,20 km<sup>2</sup> dan hanya 1,77% dari luas wilayah kecamatan Sebulu. Letak kantor camat di kecamatan Sebulu berada di desa Sebulu Ilir, sedangkan untuk desa yang letaknya paling jauh dari kecamatan yaitu desa Leka Kidau dengan jarak sejauh 40 km. Dan untuk desa terdekat yaitu desa Sebulu Ilir yang hanya berjarak 1 km atau berbatasan langsung dengan desa Sebulu Ulu.

Kecamatan Sebulu termasuk daerah dataran rendah sehingga tidak terdapat gunung dan yang ada hanya perbukitan kecil. Wilayah ini juga merupakan kecamatan yang dilalui oleh satu sungai yaitu sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Indonesia. Sungai Mahakam tersebut merupakan satu-satunya jalur transportasi air yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. Untuk curah hujan sendiri kecamatan ini tergolong cukup tinggi yaitu rata-rata 186 mm dan 11 hari hujan. Curah hujan paling tinggi berada di bulan April yaitu 315 mm dengan jumlah hari hujan 11 hari.

#### **Penduduk**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Sebulu adalah 40.620 jiwa yang terbagi menjadi 18.745 jiwa laki-laki dan 20.646 jiwa perempuan.



Gambar 4.5  
Jumlah Penduduk Kecamatan Sebulu

#### 4.1.6. Gambaran Umum Kecamatan Tenggarong Seberang

Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki luas wilayah 443,40 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh yang relatif cukup jauh dari ibukota Kecamatan. Secara Geografis Kecamatan Tenggarong Seberang berbatas sebelah utara dengan Kecamatan Sebulu, sebelah timur Kecamatan Marangkayu, sebelah selatan Kecamatan Loa Kulu dan sebelah barat Kecamatan Tenggarong. Jumlah desa yang terdapat pada Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebanyak 18 Desa dengan ibukota kecamatan terletak pada Desa Manunggal Jaya. Sementara desa terjauh dari ibukota kecamatan adalah desa Loa ulung da Mulawarman dengan jarak tempuh 32 kilometer.

Kecamatan Tenggarong Seberang dilalui oleh sungai Mahakam yang melewati beberap desa yaitu Desa Loa ulung, Loa Pari, Loa Raya, perjiwa, Teluk Dalam, dan Loa Lepu. Desa terluas adalah Desa Separi dengan luas 17,14 persen dari dari luas Kecamatan Tenggarong Seberang secara keseluruhan. Sedangkan Desa bukit Raya merupakan Desa dengan luas terkecil yakni 2,28 persen dari keseluruhan luas Kecamatan Tenggarong Seberang. Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang berada

di daerah dataran rendah sehingga tidak dijumpai gunung hanya bukit-bukit kecil yang ada di beberapa wilayah. Danau alami juga tidak dijumpai di wilayah ini hanya danau-danau bekas galian tambang.

### **Penduduk**

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kecamatan tenggarong Seberang pada tahun 2022 sebanyak 72.323 jiwa yang terbagi menjadi 37.593 jiwa penduduk laki-laki dan 34.730 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk sebesar 108 dimana setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 108 jiwa penduduk laki-laki. Desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa bangun Rejo yaitu 20.964 jiwa, sedangkan Desa Tanjung Batu adalah desa dengan penduduk paling sedikit yakni sebanyak 1.354 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang rata-rata sebanyak 163 jiwa per kilometer persegi. Desa dengan penduduk terpadat adalah desa Bukit raya dengan kepadatan sebanyak 517 jiwa per kilometer sedangkan desa dengan kepadatan terendah adalah Desa Teluk Dalam dengan kepadatan sebanyak 52 jiwa per kilometer.



Gambar 4.6

Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang

#### **4.1.7. Gambaran Umum Kecamatan Muara Kaman**

Kecamatan Muara Kaman, terletak secara geografis di daerah khatulistiwa pada koordinat 116° 28' - 117° 09' Bujur Timur dan 0° 39' LU - 0° 18' LS, dengan ketinggian 16 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah mencapai 3.410,10 km<sup>2</sup>. Secara administratif, kecamatan ini

berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara, Kota Bontang di sebelah timur, Kecamatan Sebulu di sebelah selatan, dan Kecamatan Kota Bangun di sebelah barat.

Kecamatan Muara Kaman terdiri dari 20 desa, yang sebagian besar terletak di bantaran sungai. Sungai Mahakam mengalir melalui wilayah ini, bersama dengan beberapa anak sungainya seperti Sungai Sabintulung, Sungai Kedang Kepala, Sungai Kedang Rantau, dan Sungai Puan Cepak. Selain itu, terdapat juga dua danau, yaitu Danau Siran dan Danau Mau.

Seperti wilayah lain di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Kaman memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di kecamatan ini cukup tinggi, terutama pada bulan April yang mencapai 263 mm. Meskipun ada beberapa bulan dengan data curah hujan yang tidak tercatat sempurna, rata-rata curah hujan di Kecamatan Muara Kaman adalah sekitar 163 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 11 hari per bulan.

### **Penduduk**

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Muara Kaman berdasarkan registrasi penduduk adalah sebanyak 44.214 jiwa, terdiri dari 23.291 laki-laki dan 20.923 perempuan. Dengan luas wilayah yang ada, kepadatan penduduk di Kecamatan Muara Kaman adalah sekitar 13 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Pancajaya, dengan 95 jiwa per kilometer persegi. Namun, data mengenai jumlah kepala keluarga di desa tersebut tidak tersedia. Sebaliknya, kepadatan penduduk dan kepala rumah tangga terendah terdapat di Desa Menamang Kanan dan Desa Tunjungan, dengan hanya 3 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Muara Kaman, yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, adalah 111. Artinya, terdapat 111 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Perubahan jumlah penduduk di kecamatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk baik yang datang

maupun yang pergi. Namun, data spesifik mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk untuk tahun tersebut tidak tersedia.



Gambar 4.7  
Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Kaman

#### 4.1.8 Deskripsi BUMDesa

Upaya peningkatan kewenangan desa telah diatur melalui berbagai regulasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Bab IV Pasal 18, disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Semua ini didasarkan pada inisiatif lokal, hak asal usul, dan tradisi yang berlaku di desa. Tujuan utama dari pemberian kewenangan ini adalah untuk memperkuat posisi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang tersebut, dalam Pasal 78, menguraikan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta menekan angka kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pengembangan ekonomi desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1). BUMDesa diharapkan menjadi instrumen utama dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan pedoman yang lebih spesifik terkait BUMDesa. Berdasarkan Pasal 1, BUMDesa merupakan badan hukum yang dibentuk oleh desa, baik secara individu maupun bersama desa lainnya, dengan tujuan mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan publik, serta menjalankan usaha lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa menjadi wadah bagi desa untuk mengelola potensi ekonominya secara mandiri dan profesional.

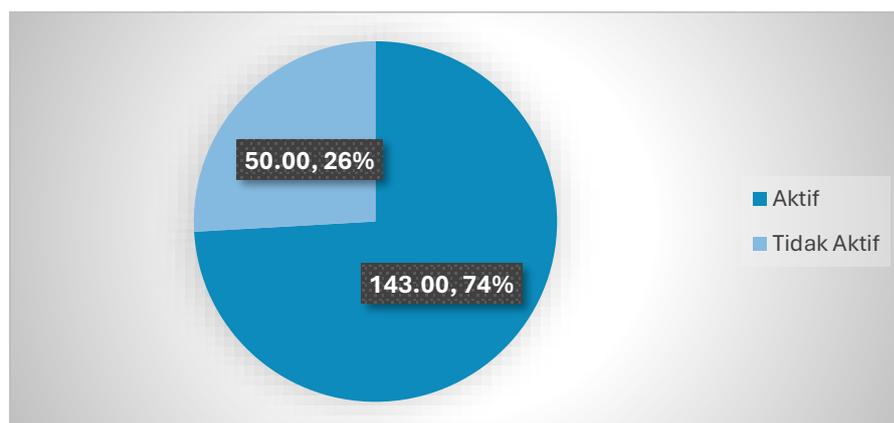
Di berbagai wilayah, implementasi BUMDesa menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagai contoh, di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah telah mengambil langkah signifikan dengan mendorong pembentukan BUMDesa di setiap desa. Data menunjukkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 193 BUMDesa, dengan Kecamatan Kota Bangun sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, yaitu 21 BUMDesa. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Peran BUMDesa sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal, BUMDesa dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, BUMDesa diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk desa.

Meskipun demikian, keberadaan BUMDesa juga menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (2023), dari 193 BUMDesa yang terbentuk, 50 di antaranya (sekitar 26%) tidak aktif lagi. Penyebab utama ketidakaktifan ini antara lain adalah kurangnya kapasitas manajerial dan sumber daya manusia yang memadai, minimnya pendampingan dan

pengawasan dari pemerintah daerah, serta sulitnya akses ke pasar dan modal usaha. Selain itu, beberapa BUMDesa belum berbadan hukum, yang menghambat operasional dan pengembangan usaha mereka. Data menunjukkan bahwa hanya 90 BUMDesa (47%) yang telah memiliki sertifikat nama dan berbadan hukum. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan legalitas ini sering kali disebabkan oleh prosedur administratif yang rumit dan biaya yang tinggi. Semua faktor ini secara kumulatif menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDesa, menyebabkan banyak yang tidak aktif atau beroperasi di bawah kapasitas optimal.

Secara keseluruhan, meskipun kehadiran BUMDesa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan operasionalisasinya perlu segera diatasi. Dengan dukungan kebijakan yang lebih baik dan peningkatan kapasitas manajerial, BUMDesa berpotensi menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.



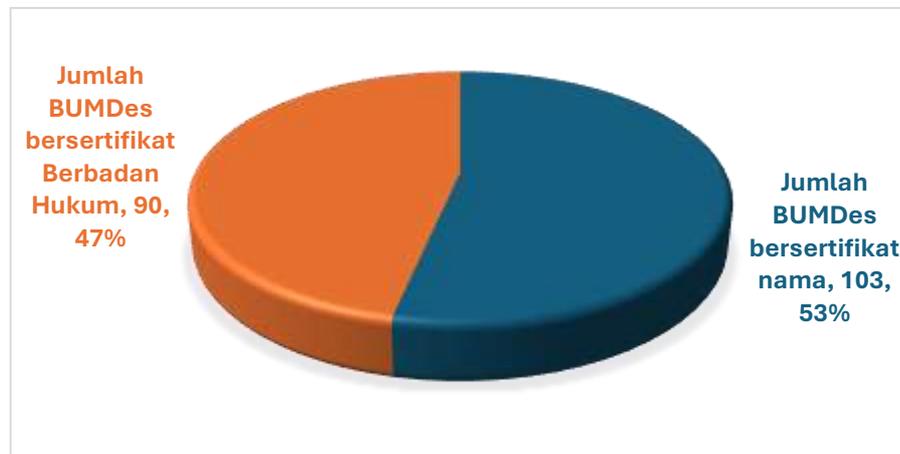
Gambar4.8

Jumlah BUMDesa yang aktif dan tidak Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KUKAR, 2023

BUMDesa yang telah bersertifikat nama dan berbadan hukum masih di bawah 50 %, yakni 47% ini akan berdampak pada pengembangan BUMDesa itu sendiri. Dengan demikian upaya untuk menyadarkan akan

pentingnya badan hukum suatu Lembaga bisnis perlu terus digalakan oleh pemerintah selaku pembina atau *stakeholder* yang terkait dengan ini.



Gambar 4.9

Jumlah BUMDesa yang Berbadan hukum

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KUKAR, 2023

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat serta pengurus BUMDesa mengenai pentingnya legalitas dalam operasional bisnis. Tanpa status badan hukum, BUMDesa mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan, seperti kredit perbankan atau investasi, serta menghadapi kendala dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang mengharuskan adanya jaminan legalitas. Selain itu, proses administrasi yang kompleks dan biaya yang tinggi untuk memperoleh sertifikasi dan status hukum menjadi hambatan signifikan bagi banyak BUMDesa.

Minimnya pendampingan dan edukasi dari pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait turut memperlambat proses legalisasi BUMDesa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai urgensi status badan hukum bagi entitas bisnis. Pemerintah, sebagai pembina, bersama para stakeholder lainnya, perlu terus mendorong upaya ini agar BUMDesa dapat beroperasi secara lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDesa akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan

masyarakat desa. Jumlah BUMDesa yang mengurus badan hukum disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 4.1 BUMDesa yang bersertifikat nama, berbadan hukum, perbaikan badan hukum, pendaftaran badan hukum dan perbaikan nama

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Jumlah BUMDesa bersertifikat nama	103
Jumlah BUMDesa bersertifikat Berbadan Hukum	90
Jumlah BUMDesa Perbaikan badan hukum	21
Jumlah BUMDesa Pendaftaran badan hukum	4
Jumlah BUMDesa perbaikan nama	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KUKAR, 2023

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Deskripsi tentang Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 107 orang, yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, dan Marangkayu. Berdasarkan hasil survey quisioner yang diolah menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Karakteristik Responden, 2024

Uraian		Skor					Jumlah
		1	2	3	4	5	
Usia responden	Frekuensi	0	24	42	36	5	107
	Persen	0	22,4	39,3	33,6	4,7	100
Jenis kelamin	Frekuensi	96	11	0	0	0	107
	Persen	89,7	10,3	39,7	16,4	5,5	100
Jenjang pendidikan responden	Frekuensi	0	0	81	26	0	107
	Persen	0	0	75,7	24,3	0	100

Sumber: Hasil Olah Data Primer oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 5.1 diperoleh bahwa usia responden dominan pada usia 35-44 tahun dengan dominasi jenis kelamin Laki-laki sebanyak 89,7%, jenjang pendidikan dominan SMA-D3. Adapun jenjang pendidikan istri/suami paling banyak pada jenjang SMA-D3.

### 5.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel yang dikaji terdiri dari endogen variable yang meliputi; (1) variable Modal Sosial (X1) dan variable Kompetensi manager (X2) dan (2) variable eksogen yang terdiri dari variable pemberdayaan BUMDes (Y1), integrasi BUMDes (Y2), serta kesejahteraan masyarakat (Y3). Hasil

perhitungan menggunakan bantuan computer program SPSS 18 deskripsi variable di sajikan Pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Deskripsi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator		Skor					Jumlah	
				1	2	3	4	5		
1	Modal Sosial (X1)	Kepercayaan (X11)	f	0	0	0	32	75	107	
			%	0	0	0	29,9	70,1	100	
		Pemanfaatan BUMDes (X12)	f	0	12	26	48	21	107	
			%	0	11,2	24,3	44,9	19,6	100	
		Kerjasama keberlanjutan BUMDes (X13)	f	0	0	0	66	41	107	
			%	0	0	0	61,7	38,3	100	
	Adanya Musyawarah (X14)	f	0	0	0	59	48	107		
		%	0	0	0	55,1	44,9	100		
	Betulungan etam bisa(X15)	f	0	0	0	49	58	107		
		%	0	0	0	45,8	54,2	100		
	2	Kompetensi manager BUMDes (X2)	Kemampuan teknis (X21)	f	0	0	34	59	14	107
				%	0	0	31,8	55,1	13,1	100
Pengetahuan yang berorientasi profit (X22)			f	0	0	1	48	58	107	
			%	0	0	0,9	44,9	54,2	100	
Memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis (X23)			f	0	0	13	52	42	107	
			%	0	0	12,1	48,6	39,3	100	
Motivasi meningkatkan produktivitas (X24)			f	0	0	48	46	13	107	
			%	0	0	44,9	43,0	12,1	100	
Perilaku mengelola BUMDes berkelanjutan (X25)			f	0	0	0	18	89	107	
			%	0	0	0	16,8	83,2	100	
3	Pemberdayaan BUMDes (Y1)	Penyadaran akan pentingnya BUMDes (Y11)	f	0	0	17	60	30	107	
			%	0	0	15,9	56,1	28	100	
		Penyadaran agar melaksanakan integrasi BUMDes (Y12)	f	0	0	20	21	66	107	
			%	0	0	18,7	19,6	61,7	100	
		Bimbingan untuk perencanaan integrasi BUMDes (Y13)	f	0	0	0	2	105	107	
			%	0	0	0	1,9	98,1	100	

		Latihan pelaksanaan integrasi BUMDes (Y14)	f	0	0	0	37	70	107
			%	0	0	0	34,6	65,4	100
		Pendayaan BUMDes pada tatanan integrasi (Y15)	f	0	0	0	25	82	107
			%	0	0	0	23,4	76,6	100
4	Integrasi BUMDes (Y2)	Sikap manager terhadap perlunya kerjasama BUMDes dengan BUMDes (Y21)	f	0	0	23	23	61	107
			%	0	0	21,5	21,5	57,0	100
		Sikap Manager terhadap perlunya kerjasama BUMDes dengan Perusahaan (Y22)	f	0	16	27	0	64	91
			%	0	15,0	25,2	0	59,8	100
		Sikap manager terhadap perlunya kerjasama BUMDes dengan kelembagaan usaha (Y23)	f	0	9	52	24	22	107
			%	0	8,4	48,6	22,4	20,6	100
		Motivasi untuk melaksanakan kerjasama BUMDes (Y24)	f	0	0	35	15	57	107
			%	0	0	32,7	14,0	53,3	100
		Manager merencanakan integrase BUMDes (Y25)	f	0	9	45	18	35	107
			%	0	8,4	42,1	16,8	32,7	100
		Telah dilaksanakan Integrasi BUMDes (Y26)	f	0	0	37	11	59	107
			%	0	0	34,6	10,3	55,1	100
		Integrase BUMDes telah dievaluasi (Y27)	f	0	0	0	43	64	107
			%	0	0	0	40,2	59,8	100
		Koordinasi terlaksana (Y28)	f	0	0	31	24	52	107
			%	0	0	29,0	22,4	48,6	100
5	Kesejahteraan Masyarakat (Y3)	Pendapatan meningkat (Y31)	f	0	0	0	76	31	107
			%	0	0	0	71,0	29,0	100
		Kepemilikan asset masyarakat meningkat (Y32)	f	0	11	20	58	18	107
			%	0	10,3	18,7	54,2	16,8	100
		Derajad pendidikan meningkat (Y33)	f	0	0	0	79	28	107
			%	0	0	0	73,8	26,2	100

Derajat kesehatan meningkat (Y34)	f	0	11	16	58	22	107
	%	0	10,3	15,0	54,2	20,5	100
Hubungan social masyarakat semakin baik (Y35)	f	0	0	19	58	30	107
	%	0	0	17,8	54,2	28,0	100

Sumber: Data promer diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut ini. Jawaban responden tentang modal social (X1) yang terdiri dari indicator, trust, jejaring (kerjasama) dan norma (*betulungan etam bisa*) untuk semua item jawaban responden cenderung menjawab positif. Variabel kompetensi (X2) terdiri dari indikator skill, pengetahuan, motif dan trait. Jawaban responden untuk variable kompetensi manager BUMDes (X2) dominan cenderung menjawab positif. Sebesar 55,1 persen jawaban setuju bahwa manager BUMDes memerlukan kemampuan teknis tentang pengelolaan BUMDes yang berbasis teknologi unggulan dalam rangka mewujudkan integrase BUMDes.

Variabel pemberdayaan (Y1) terdiri dari; indicator penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Jawaban responden dominan cenderung menjawab positif. Jawaban responden terhadap integrase BUMDes (Y2) juga kecenderungan jawaban responden dominan positif. Variabel kesejahteraan merupakan outcome dari kajian ini, terdiri dari indicator; tingkat pendapatan, kepemilikan asset, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan hubungan social menunjukkan jawaban responden yang cenderung positif.

### 5.3 Pengujian Model Pengukuran (*Measurement Model*)

#### A. *Outer Loading factor (LF)*

Berdasarkan hasil uji loading factor (Tabel...) menunjukkan hasil yang dapat diterima. Menurut (Abdillah & Jogiyanto, 2015) jika skor loding antara 0,5-0,7 sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator yang memiliki nilai loading factor tersebut sepanjang skor AVE dan community indicator tersebut di atas 0,5 artinya skor loading factor antara 0.5 – 0.7 dapat

diterima. Menggunakan model awal penelitian diperoleh hasil sebagaimana Tabel 5.3

Table 5.3 Nilai Loading full model (model awal)

Indikator	BUMDes Integration (Y2)	Competency (X2)	Empower (Y1)	Social Capital (X1)	Welfare (Y3)
X1.1				0,2435	
X1.2				-0,4373	
X1.3				0,3095	
X1.4				-0,6516	
X1.5				0,8269	
X2.1		0,3505			
X2.2		0,0802			
X2.3		0,8974			
X2.4		0,8344			
X2.5		-0,4640			
Y1.1			-0,8682		
Y1.2			0,8150		
Y1.3			-0,1173		
Y1.4			-0,0734		
Y1.5			-0,3773		
Y2.1	0,8548				
Y2.2	0,6073				
Y2.3	0,4473				
Y2.4	-0,1938				
Y2.5	0,1312				
Y2.6	-0,1264				
Y2.7	-0,1509				
Y2.8	0,8417				
Y3.1					0,2382
Y3.2					0,1075
Y3.3					-0,0123
Y3.4					0,4539
Y3.5					0,6336

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

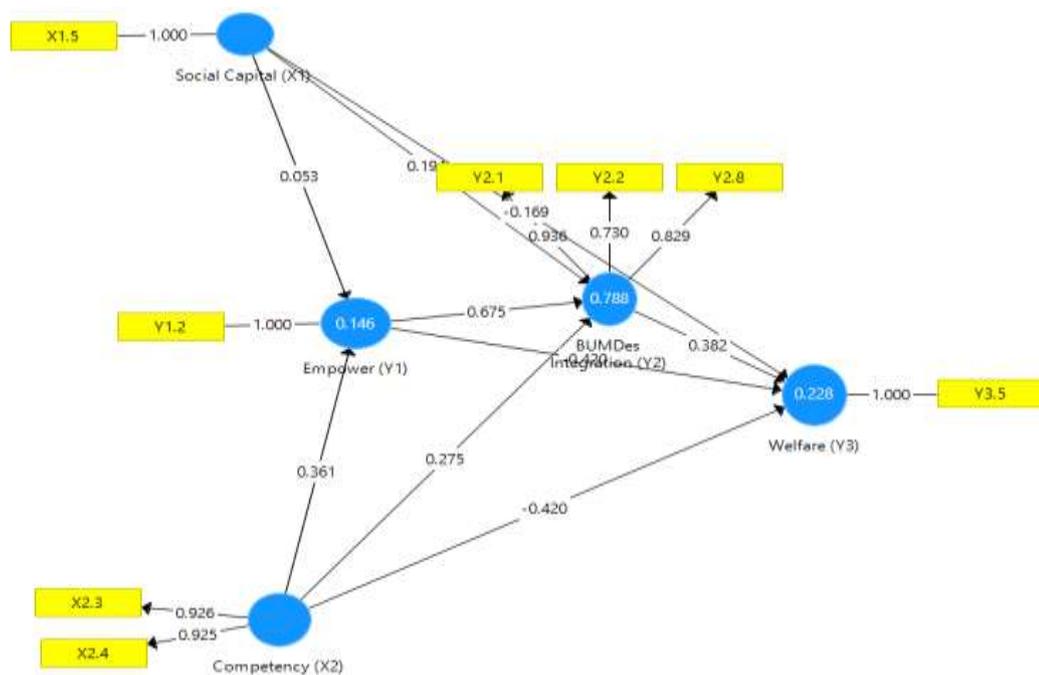
Langkah selanjutnya agar memenuhi persyaratan analisis, maka indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,5 dihilangkan dari

model. Dengan demikian diperoleh hasil sebagaimana Tabel 5.4 dan Gambar 5.1

Tabel 5.4 Nilai Loading Faktor Model Akhir

Indikator	BUMDes Integration (Y2)	Competency (X2)	Empower (Y1)	Social Capital (X1)	Welfare (Y3)
X1.5				1,000	
X2.3		0,926			
X2.4		0,925			
Y1.2			1,000		
Y2.1	0,936				
Y2.2	0,730				
Y2.8	0,829				
Y3.5					1,000

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024



Gambar 5.1 Nilai loading factor model akhir

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

## B. Uji Reliabilitas dan Validitas

Instrumen reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan dua kriteria yaitu nilai composite reliability dan cronbach's alpha. Penggunaan

cronbach's alpha cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel dibandingkan composite reliability sehingga disarankan untuk menggunakan composite reliability. Sebuah konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai cronbach's alpha lebih besar 0,70. Menurut (Hair et al., 2022) variabel dikatakan reliabel jika nilai composite reliability diatas 0,70 dan nilai AVE >0,50 persyarat convergent validity terpenuhi. Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 5.5 semua variable memiliki nilai AVE di atas 0,50. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi model pengukuran dari aspek convergent validity terpenuhi.

Tabel 5.5 Reliabilitas dan validitas

Variable	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
BUMDes Integration (Y2)	0,787	0,837	0,874	0,699
Competency (X2)	0,833	0,833	0,923	0,857
Empower (Y1)	1,000	1,000	1,000	1,000
Social Capital (X1)	1,000	1,000	1,000	1,000
Welfare (Y3)	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

### C. Uji Discriminant Validity (*Discriminant validity*)

Uji korelasi diskriminan dilakukan untuk melihat korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Jika nilai akar kuadrat (square root of average) AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model maka dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki tingkat validitas yang baik.

Pengujian *discriminant validity* dilakukan pada tingkat indikator dan variabel. Pada tingkat indikator digunakan ukuran *cross loadings* bahwa setiap item pengukuran yang mengukur konstruk/variable A akan berkorelasi lebih tinggi dengan konstruk/ variabel A yang diukurnya dan

berkorelasi rendah dengan variable lainnya. Validitas diskriminan pada tingkat variabel adalah *Fornell-Lacker Criterion* dan HTMT (*Heterotrait Monotrait Ratio*). Ukuran *Fornell-Lacker Criterion* yaitu membandingkan akar AVE dengan korelasi antara variable. Menurut kriteria Fornell dan Lacker, model mempunyai validitas diskriminan baik bila akar AVE variabel lebih besar dari korelasi antara variabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel membagi variasi item pengukurannya lebih tinggi kepada item pengukuran yang mengukurnya dan membagi rendah kepada item pengukuran variabel lainnya.

Ukuran discriminant validity lainnya yang dikenalkan oleh yaitu HTMT (*Heterotrait Monotrait Ratio*) dengan nilai yang direkomendasikan dibawah 0,85 atau dibawah 0,90. HTMT adalah rasio dari Heterotrait (rerata korelasi antara item pengukuran variable yang berbeda) dengan akar dari perkalian geometris Monotrait (korelasi antara item yang mengukur variable yang sama). Bila nilai HTMT di atas 0,90 menunjukkan bahwa variabel yang diukur oleh sejumlah item pengukuran kurang discriminant validity. Menurut (Hair et al., 2022) bahwa ukuran HTMT ini lebih baik digunakan dari metode fornell dan lacker criterion dalam mendeteksi validitas diskriminan.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *Fornell-Larcker Criterion* sebagaimana disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	BUMDes Integratio n (Y2)	Competency (X2)	Empowe r (Y1)	Social Capital (X1)	Welfare (Y3)
BUMDes Integration (Y2)	0,836				
Competenc y (X2)	0,593	0,926			
Empower (Y1)	0,812	0,378	1,000		
Social Capital (X1)	0,396	0,321	0,168	1,000	

<b>Welfare (Y3)</b>	-0,275	-0,407	-0,297	-0,223	<b>1,000</b>
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------------

Sumber: Data primer diolah peneliti

Pada tabel 5.5 perbandingan dari nilai akar AVE memperlihatkan bahwa masing-masing dari nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel laten dalam penelitian memiliki *construct validity* dan *discriminant validity* yang baik.

Selanjutnya berdasarkan penilaian HTMT disajikan pada Tabel 5.7 diperoleh nilai HTMT pasangan variabel kurang dari 0,90. Hal ini menunjukkan variabel mempunyai *discriminant validity* yang baik.

Tabel 5.7 *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

Variable	BUMDes Integration (Y2)	Competency (X2)	Empower (Y1)	Social Capital (X1)	Welfare (Y3)
BUMDes Integration (Y2)					
Competency (X2)	<b>0,730</b>				
Empower (Y1)	0,894	<b>0,414</b>			
Social Capital (X1)	<b>0,445</b>	<b>0,351</b>	<b>0,168</b>		
Welfare (Y3)	<b>0,422</b>	<b>0,446</b>	<b>0,297</b>	<b>0,223</b>	

Sumber: Data primer diolah peneliti

Untuk mengevaluasi *discriminant validity* pada tingkat indikator digunakan *Cross loadings*. *Cross loadings* berisi matrik LF atau korelasi antara setiap item pengukuran dengan semua variabel. Tabel 5.8 menunjukkan nilai *Cross loading* penelitian ini.

Tabel 5.8 Nilai *Cross Loadings*

Indikator	BUMDes Integration (Y2)	Competency (X2)	Empower (Y1)	Social Capital (X1)	Welfare (Y3)
X1.5	0,396	0,321	0,168	<b>1,000</b>	-0,223
X2.3	0,613	<b>0,926</b>	0,367	0,319	-0,273
X2.4	0,484	<b>0,925</b>	0,332	0,275	-0,481

Y1.2	0,812	0,378	1,000	0,168	-0,297
Y2.1	0,936	0,521	0,844	0,263	-0,171
Y2.2	0,730	0,449	0,512	0,301	0,215
Y2.8	0,829	0,517	0,636	0,429	-0,556
Y3.5	-0,275	-0,407	-0,297	-0,223	1,000

Sumber: Data primer diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 5.8 diperoleh hasil bahwa item pengukuran masing-masing variabel berkorelasi lebih kuat dengan variabel utama yang diukurnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel membagi varians lebih kuat pada masing-masing item yang mengukurnya. Secara keseluruhan aspek discriminant validity pada tingkat item pengukuran terpenuhi

#### 5.4 Evaluasi Model Struktural (Evaluasi *Inner Model*)

Evaluasi model struktural dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut ini (Yamin, 2023):

##### 1) Pemeriksaan Kolinieritas

Pemeriksaan kolinieritas dilakukan melalui pemeriksaan antara variable bebas / eksogen (inner collinearity). Bila inner VIF > 5 maka ada dugaan multikolinier. Meskipun demikian menurut (Hair et al., 2022) nilai VIF antara 3-5 ada potensial terjadi multikolinier dan yang ideal adalah bila VIF < 3 (tidak ada multikolinier/ kolinieritas rendah). Pemeriksaan multikolinier ini menjadi penting dalam analisis statistik karena multikolinier dapat menyebabkan taksiran parameter yang dihasilkan bias, nilai standard error menjadi besar dan selang kepercayaan 95% taksiran parameter path coefficient menjadi lebar dan bahkan berpengaruh terhadap hasil pengujian hipotesis

Tabel 5.9 *Inner VIF*

Variable	BUMDes Integration (Y2)	Competency (X2)	Empower (Y1)	Social Capital (X1)	Welfare (Y3)
BUMDes Integration (Y2)					4,715
Competency (X2)	1,268		1,115		1,625

Empower (Y1)	1,170		3,319
Social Capital (X1)	1,118	1,115	1,295
Welfare (Y3)			

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2024

. Berdasarkan hasil perhitungan dengan SmartPLS diperoleh hasil ditampilkan pada Tabel 5.9. Berdasarkan tabel inner VIF atau pemeriksaan multikolinier antara variable, diketahui bahwa nilai VIF dibawah 5 menunjukkan gejala multikolinier rendah/ dapat diabaikan.

## 2) Pengujian hipotesis penelitian melalui proses bootstrapping

Pengujian hipotesis penelitian melalui proses bootstrapping dengan sub sample=5000. PLS SEM tidak mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal, oleh karena itu maka prosedur pengujian hipotesis menggunakan pendekatan prosedur non parameterik yaitu bootstrapping. Prosedur ini adalah alternatif pengujian hipotesis dari metode eksak ketika distribusi sampling data tidak diketahui, dilakukan dengan cara pengambilan sample dan pengembalian sample (resampling) sebanyak p kali (umumnya 5000), yang berguna untuk menciptakan *standard error* dan taksiran parameter. Hasil pengujian dilihat dari nilai *t-values* untuk pengujian 2 arah (two-tailed test) adalah 1.65 (signifikan level = 10%), 1.96 (signifikan level = 5%), dan 2.58 (signifikan level = 1%). Pada SmartPLS telah mengeluarkan p-value untuk setiap evaluasi dan membandingkan dengan alpha yang telah ditentukan sebelumnya (0,05 atau 0,01). Bila p-value < 0,05 maka ada pengaruh antara variabel signifikan. Pemilihan metode *bootstrap* dapat dilakukan antara *Bias Corrected and Accelerated* (BCA) method dan percentile method. Metode BCA dianjurkan karena dalam beberapa situasi distribusi data tidak normal dapat berpengaruh terhadap taksiran PLS sehingga menghasilkan distribusi data peak dan skewed akan tetapi dengan metode BCA dapat menskalakan/ menyesuaikan hasil confident interval taksiran parameter.

## 3) Melihat selang kepercayaan 95% *path coefficient*

Nilai ini juga wajib dilaporkan sejauhmana dalam selang kepercayaan 95% nilai path coefficient yang dihasilkan. Selanjutnya adalah melihat koefisien jalur dan nilai T untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil perhitungan melalui SmartPLS di sajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Koefisien jalur dan T Statistik

Variable	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
BUMDes Integration (Y2) -> Welfare (Y3)	0,382	0,390	0,161	2,381	<b>0,017</b>
Competency (X2) -> BUMDes Integration (Y2)	0,275	0,273	0,065	4,265	<b>0,000</b>
Competency (X2) -> Empower (Y1)	0,361	0,358	0,085	4,251	<b>0,000</b>
Competency (X2) -> Welfare (Y3)	-0,420	-0,424	0,081	5,166	<b>0,000</b>
Empower (Y1) -> BUMDes Integration (Y2)	0,675	0,677	0,063	10,693	<b>0,000</b>
Empower (Y1) -> Welfare (Y3)	-0,420	-0,422	0,125	3,359	<b>0,001</b>
Social Capital (X1) -> BUMDes Integration (Y2)	0,194	0,195	0,046	4,180	<b>0,000</b>
Social Capital (X1) -> Empower (Y1)	0,053	0,054	0,093	0,566	<b>0,572</b>
Social Capital (X1) -> Welfare (Y3)	-0,169	-0,173	0,101	1,681	<b>0,093</b>

Sumber: Data primer diolah peneliti

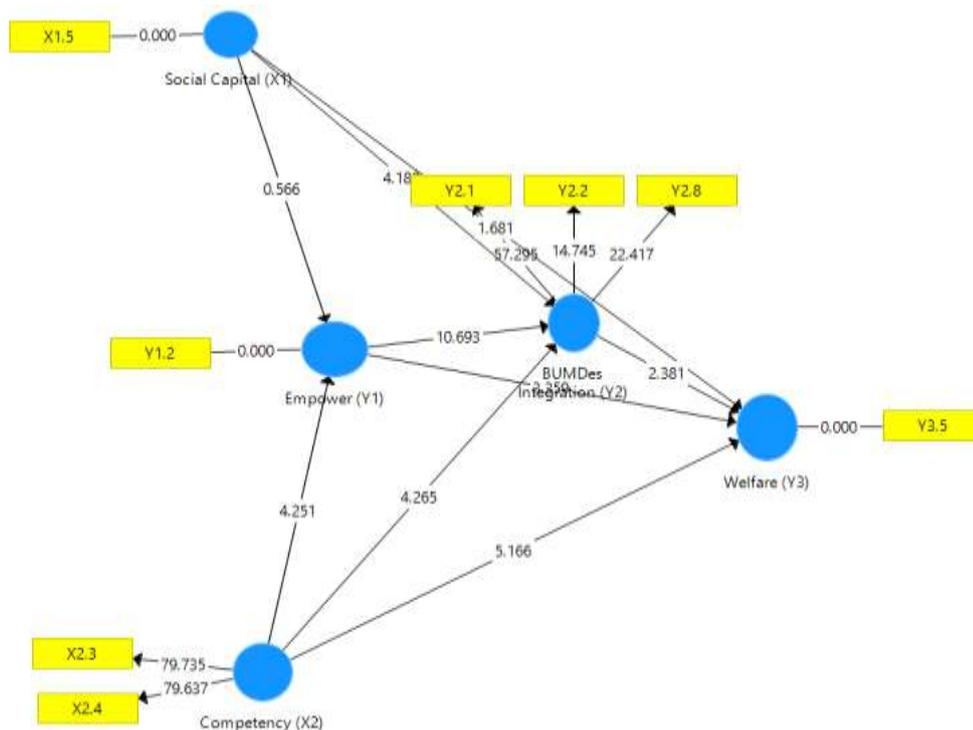
Mengacu pada Tabel 5.10 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Modal social (X1) terhadap pemberdayaan (Y1) sebesar 0,053 dan tidak signifikan dengan T statistic ( $0,566 < 1,96$ ) serta P Values ( $0,572 > 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya setiap perubahan variable modal social, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes integrasi.
- 2) Pengaruh Modal social (X1) terhadap Integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,194 dan signifikan dengan T statistic ( $4,180 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat

- diterima. Artinya setiap perubahan variable modal social, maka akan signifikan meningkatkan upaya untuk melaksanakan integrasi BUMDes.
- 3) Pengaruh Modal social (X1) terhadap Kesejahteraan (Y3) sebesar -- 0,169 dan tidak signifikan dengan T statistic ( $1,681 < 1,96$ ) serta P Values ( $0,093 > 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya setiap perubahan variable modal social, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
  - 4) Pengaruh kompetensi (X2) terhadap pemberdayaan (Y1) sebesar 0,361 dan signifikan dengan T statistic ( $4,251 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya setiap perubahan variable kompetensi pengurus BUMDes, maka akan signifikan meningkatkan upaya pemberdayaan untuk terwujudnya integrasi BUMDes.
  - 5) Pengaruh kompetensi (X2) terhadap Integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,275 dan signifikan dengan T statistic ( $4,265 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya setiap perubahan variable kompetensi pengurus BUMDes, maka akan signifikan meningkatkan upaya untuk melaksanakan integrasi BUMDes.
  - 6) Pengaruh kompetensi (X2) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,420 dan signifikan dengan T statistic ( $5,166 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya setiap peningkatan variable kompetensi pengurus BUMDes, maka akan signifikan meningkatkan upaya untuk melaksanakan integrasi BUMDes.
  - 7) Pengaruh pemberdayaan (Y1) terhadap integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,675 dan signifikan dengan T statistic ( $10,693 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya setiap perubahan variable pemberdayaan pengurus BUMDes, maka akan signifikan meningkatkan upaya untuk melaksanakan integrasi BUMDes.

- 8) Pengaruh pemberdayaan (Y1) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,420 dan signifikan dengan T statistic ( $3,359 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,001 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya setiap perubahan variable pemberdayaan pengurus BUMDes, maka akan signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Pengaruh integrasi BUMDes (Y2) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar 0,382 dan signifikan dengan T statistic ( $2,381 > 1,96$ ) serta P Values ( $0,017 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya setiap perubahan variable upaya melaksanakan integrasi BUMDes, maka akan signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil lengkap untuk model akhir dapat juga dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Hasil full Model (modela akhir)

Sumber: data Primer diolah peneliti

## 5.5 Analisis Pengaruh Modal Sosial (X1) terhadap Pemberdayaan BUMDes (Y1)

Berdasarkan hasil olah data menggunakan aplikasi SmartPLS diperoleh hasil yang dijelaskan berikut ini. Hasil uji validitas dan reliabelitas konstruk melalui penilaian hasil *brootstraping* dengan melihat T-statistic dan outer weight. Kreteria uji yang dilakukan adalah jika nilai T-statistic lebih besar dari 1.96 ( $> 1.96$ ), maka evaluasi hasilnya adalah valid (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Uji outhter model merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah validitas dan reliabilitas masing-masing indikator terhadap variabel latennya valid dan reliabel. Untuk melihat seberapa besar korelasi antara indikator dengan variabel latennya dilihat dari validitas diskriminasinya Kriteria untuk mengukur validitas diskriminan dilakukan melalui penilaian nilai *cross-loading* antara indikator dengan variabel laten. Adapun kreterianya adalah nilai item pengukuran berkorelasi lebih tinggi atau lenih kuat dengan variabel yang diukurnya dan berkorelasi lebih rendah dari variabel lainnya. Validitas tingkat variebel diukur dari nilai AVE dan *Communality* yaitu di atas 0,5. Adapun kreterianya adalah jika nilai akar AVE konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk diterima berdasarkan hasil perhitungan yang diuraikan di atas telah memenuhi kreteria yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengaruh modal sosial (X1) terhadap pemberdayaan BUMDes (Y2) dengan koefisen jalur sebesar 0,053, T statistic ( $0,566 < 1,96$ ), dan P Values sebesar 0,572 ( $0,572 > 0,05$ ). Hal ini mengandung makna bahwa modal social berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes. Pada dasarnya modal social merupakan factor produksi yang dapat mempengaruhi produktivitas usaha di masyarakat. Apabila modal social tidak termanfaatkan dengan optimal maka tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap produktivitas dalam rangka meningkatkan masyarakat. Modal social yang terdiri dari kepercayaan, kerjasama (gotong-royong), dan norma-norma yang ada hendaknya dioptimalkan dalam mencapai tujuan BUMDes. Temuan penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian (Yuliarmi, 2011) yang menyatakan modal sosial secara langsung belum mampu memperkuat pemberdayaan industri kerajinan di Provinsi Bali.

### **5.6 Analisis Pengaruh Modal Sosial (X1) terhadap Integrasi BUMDes (Y2)**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan bantuan computer dengan program SmartPLS diperoleh hasil koefisien jalur pengaruh modal social (X1) terhadap Integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,194, nilai T statistic sebesar 4,180 ( $4,180 > 1,96$ ) dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian temuan penelitian ini adalah pengaruh modal social terhadap upaya meningkatkan integrasi BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara berpengaruh positif dan signifikan. Modal social yang dimiliki masyarakat secara turun temurun yang merupakan factor penentu produktivitas kerja dapat dimanfaatkan di dalam meningkatkan integrasi BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini juga ditunjukkan oleh temuan penelitian yang menyatakan bahwa di dalam mengelola BUMDes selalu mengacu pada aturan/adat kebiasaan setempat, seperti bergotong royong (*betulungan etam bisa*) untuk keberlanjutan BUMDes yang cenderung responden dominan menjawab positif.

### **5.7 Analisis Pengaruh Modal Sosial (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y3)**

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur pengaruh modal social (X1) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,169, nilai T statistic 1,681 ( $1,681 < 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,093 ( $0,093 > 0,05$ ). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan terdapat hubungan yang negative dan signifikan antara modal social dengan kesejahteraan. Terdapat indikasi bahwa pengelolaan modal social dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan terutama melalui aktifitas BUMDes belum optimal. Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Yuliarmi et al., 2020) yang menyatakan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi di Kota

Denpasar. Demikian juga berbeda dengan hasil penelitian (Dwijatenaya et al., 2024) yang menyatakan modal sosial memiliki berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **5.8 Analisis Pengaruh Kompetensi Manager BUMDes (X2) terhadap Pemberdayaan (Y1)**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bagian sebelumnya diperoleh nilai koefisien jalur pengaruh kompetensi (X2) terhadap pemberdayaan (Y1) sebesar 0,361, nilai T statistic sebesar 4,251 ( $4,251 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi manager/pengurus BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil statistic deskriptif yang menunjukkan bahwa responden dominan memberikan jawaban cenderung positif, yakni manager BUMDes memiliki motivasi untuk meningkatkan produktivitas BUMDes agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Motivasi tinggi yang dimiliki manager ini perlu terus didorong melalui pemberdayaan, sehingga upaya meningkatkan integrasi BUMDes dapat tercapai secara maksimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Alfiansyah, 2022) yang menyatakan bahwa modal sosial yang dimiliki BUMDes Rejeki Barokah Desa Sumbergondo Kota Batu sangatlah krusial sebagai landasan pemberdayaan masyarakat.

### **5.9 Analisis Pengaruh Kompetensi Manager BUMDes (X2) terhadap integrasi BUMDes (Y2)**

Koefisien jalur pengaruh kompetensi (X2) terhadap Integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,275, nilai T statistic sebesar 4,265 ( $4,265 > 1,96$ ), dan P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan data ini disimpulkan bahwa kompetensi manager berpengaruh positif dan signifikan terhadap perlunya integrasi BUMDes. Integrasi BUMDes sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas kerja BUMDes dan berkelanjutan BUMDes itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh jawaban responden yang cenderung menjawab positif terhadap perlunya manager

BUMDes memiliki kemampuan teknis tentang pengelolaan BUMDes yang berbasis teknologi unggulan. Untuk itu, maka perlu diupayakan senantiasa meningkatkan keterampilan manager melalui penguasaan teknologi dan jiwa inovasi dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, meningkatkan pengetahuan pengelolaan management BUMDes yang berorientasi profit, meningkatkan motivasi dalam rangka peningkatan produktivitas, dan adanya perilaku terhadap BUMDes berkelanjutan.

#### **5.10 Analisis Pengaruh kompetensi Manager BUMDes (X2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y3)**

Koefisien jalur pengaruh kompetensi (X2) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,420, nilai T statistic sebesar 5,166 ( $5,166 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, akan tetapi memiliki hubungan yang negative. Hasil penelitian ini perlu dicermati kembali, bahwa dimungkin data yang diperoleh perlu dikaji atau sampel yang dipilih tidak memenuhi persyaratan.

#### **5.11 Analisis Pengaruh Pemberdayaan BUMDes (Y1) terhadap Integrasi BUMDes (Y2)**

Koefisien jalur pengaruh pemberdayaan (Y1) terhadap integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,675, nilai T statistic sebesar 10,693 ( $10,693 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan BUMDes terhadap diperlukannya integrasi BUMDes adalah berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini juga didukung oleh pernyataan responden akan perlunya unsur-unsur pemberdayaan yang terdiri dari kesadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan BUMDes dalam mewujudkan integrasi BUMDes ditingkatkan. Jawaban responden menunjukkan jawaban cenderung positif.

### **5.12 Analisis Pengaruh Pemberdayaan BUMDes (Y1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y3)**

Koefisien jalur pengaruh pemberdayaan (Y1) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,420, nilai T statistic 3,359 ( $3,359 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ). Artinya bahwa pemberdayaan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, akan tetapi memiliki hubungan yang negative. Artinya jika pemberdayaan ditingkatkan, maka kesejahteraan akan menurun. Dengan demikian, upaya-upaya pemberdayaan dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat telah optimal dilaksanakan.

### **5.13 Analisis Pengaruh Integrasi BUMDes (Y2) terhadap kesejahteraan (Y3)**

Koefisien pengaruh integrasi BUMDes (Y2) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar 0,382, nilai T statistic 2,381 ( $2,381 > 1,96$ ), dan P Values sebesar 0,017 ( $0,017 < 0,05$ ). Simpulan temuan ini adalah pengaruh Integrasi BUMDes terhadap kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya integrasi BUMDes akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, didalam mewujudkan integrasi BUMDes maka manager harus memiliki motivasi dan sikap yang baik antara sesama BUMDes, perusahaan, dan perusahaan milik perorangan/distributor, begitu juga dengan koperasi. Hal ini juga ditunjukkan oleh jawaban responden yang cenderung menjawab positif.

### **5.14 Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif digunakan untuk menilai jawaban responden sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diaplikasikan dilapangan. Analisis ini disusun berdasarkan hasil wawancara terhadap responden. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi

desa. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumberdaya ekonomi masyarakat desa. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa(PP\_Nomor\_11\_Tahun\_2021.Pdf, n.d.).

Tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan adanya BUMDes sebagaimana tujuan yang tertuang pada PP tersebut disepakati oleh semua responden dan peningkatan kesejahteraan ini dicapai BUMDes dengan memberdayakan masyarakat berupa membeli hasil pertanian sebagaimana disampaikan oleh responden nomor 21 sebagai berikut: *“Hasil pertanian dibeli oleh BUMDes”*

### **Integrasi BUMDes dengan BUMDes dan Pihak Ketiga**

Badan Usaha Milik Desa muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. Peran pemerintah desa dan masyarakat lokal dimaksimalkan untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial warga desa.

Implementasi kemitraan antara BUMDes dan swasta sesuai dengan peraturan desaa yang termuat dalam AD/ART yang didasarkan pada peraturan desa nomor 4 tahun 2016. Pemerintah desa mengetahui secara tertulis, saling menguntungkan dan dimuat dalam peraturan desa serta berdampak pada perekonomian Masyarakat dan sumberdaya manusia setempat(Bagus, 2020).

Integrasi BUMDes dengan BUMDes, BUMDes dengan Perusahaan, BUMDes dengan Perorangan atau Koperasi perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat. Menurut reponden

no. 6 *“perlu dilaksanakan integrasi/kerjasama BUMDes dengan pihak lain, bisa berupa BUMDes dengan perusahaan ataupun yang lain”*.

Tantangan dalam integrasi BUMDes dengan berbagai pihak diakui tidak mudah. Selain itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat, baik secara internal maupun eksternal.

BUMDes sebagai sebuah organisasi membutuhkan anggota yang mengelola sehingga berkembang sebagai roda penggerak perekonomian desa (Anas et al., 2020).

Keberadaan BUMDes diharapkan memberi kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk membeli hasil produksi masyarakat, maupun meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh responden no.39 *“kerjasama BUMDes dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat membeli hasil masyarakat”*.

Integrasi antara BUMDes dengan pihak lain dapat dilakukan dengan berbagai pola diantaranya adalah kemitraan dalam politik berupa aturan dan budget, hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait. Kerjasama dalam bentuk pemasaran hasil produksi, bisa bekerjasama dengan dunia usaha dan industri termasuk BUMDes yang lain. Kerjasama dalam bentuk bimbingan teknis/pelatihan dapat dilakukan dengan mitra Dinas atau badan terkait. Kerjasama dalam bentuk konsultan, nara sumber, dilakukan bersama dengan perguruan tinggi (Suyatna, 2018).

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh bahwa semua indikator dalam variable modal social, kompetensi manager/pengurus, pemberdayaan BUMdes, integrase BUMDes, dan kesejahteraan masyarakat jawaban responden cenderung positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes perlu berintegrasi, baik sesama BUMDes, dengan perusahaan, serta pihak perorang dalam arti pemasok agar produktivitas dan keberlanjutan BUMDes dapat terjaga guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistic inferensial diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan menggunakan SmartPLs menunjukan koefisien pengaruh modal social (X1) terhadap pemberdayaan (Y1) sebesar 0,053, T statistic adalah 0,566 ( $0,566 < 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,572 ( $0,572 > 0,05$ ). Temuan kajian ini adalah pengaruh modal social terhadap pemberdayaan BUMDes berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan.
2. Koefisien jalur pengaruh modal social (X1) terhadap Integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,194, nilai T statistic sebesar 4,180 ( $4,180 > 1,96$ ) dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian temuan penelitian ini adalah pengaruh modal social terhadap upaya meningkatkan integrasi BUMDes di Kabupaten Kutai Kartanegara berpengaruh positif dan signifikan.
3. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur pengaruh modal social (X1) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar  $-0,169$ , nilai T statistic 1,681 ( $1,681 < 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,093 ( $0,093 > 0,05$ ). Temuan penelitian tentang hubungan antara modal social dengan kesejahteraan bernilai negative dan signifikan mengindikasikan bahwa modal social

dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan terutama melalui aktifitas BUMDes belum optimal.

4. Nilai koefisien jalur pengaruh kompetensi (X2) terhadap pemberdayaan (Y1) sebesar 0,361, nilai T statistic sebesar 4,251 ( $4,251 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi manager/pengurus BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes.
5. Nilai koefisien jalur pengaruh kompetensi (X2) terhadap Integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,275, nilai T statistic sebesar 4,265 ( $4,265 > 1,96$ ), dan nilai P Values ( $0,000 < 0,05$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi manager/pengurus BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap integrasi BUMDes.
6. Nilai koefisien jalur pengaruh kompetensi (X2) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,420, nilai T statistic sebesar 5,166 ( $5,166 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, akan tetapi memiliki hubungan yang negative.
7. Nilai koefisien jalur pengaruh pemberdayaan (Y1) terhadap integrasi BUMDes (Y2) sebesar 0,675, nilai T statistic sebesar 10,693 ( $10,693 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan BUMDes terhadap diperlukannya integrasi BUMDes adalah berpengaruh positif dan signifikan.
8. Nilai koefisien jalur pengaruh pemberdayaan (Y1) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar -0,420, nilai T statistic 3,359 ( $3,359 > 1,96$ ), dan nilai P Values sebesar 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ). Temuan kajian ini adalah pemberdayaan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, akan tetapi memiliki hubungan yang negative.
9. Nilai koefisien pengaruh integrasi BUMDes (Y2) terhadap kesejahteraan (Y3) sebesar 0,382, nilai T statistic 2,381 ( $2,381 > 1,96$ ), dan P Values sebesar 0,017 ( $0,017 < 0,05$ ). Simpulan temuan ini

adalah pengaruh Integrasi BUMDes terhadap kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan.

## 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dapat direkomendasi untuk membuat suatu kebijakan terhadap peningkatan Integrasi Bumdesa di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

1. Memanfaatkan modal social secara optimal yang dimiliki seperti unsur *trust*, norma, kerjasama, dan *betulungan etam bisa* agar integrase BUMDes dapat ditingkatkan.
2. Kompetensi manager/pengurus yang berupa peningkatan skill, pengetahuan, motivasi, dan trait perlu terus ditingkatkan melalui penguasaan teknologi dan inovasi agar integrase BUMDes dapat meningkat. Beberapa hal yang dapat dilakukan terutama oleh instansi terkait yaitu melalui pelatihan-pelatihan atau workshop.
3. Diperlukan upaya-upaya pemberdayaan BUMDes yang meliputi; penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan agar peningkatan integrase BUMDes cepat terwujud dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan integrase BUMDes harus diupayakan dengan optimal untuk keberlanjutan BUMDes itu sendiri maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) (in Indonesian)*. CV Andi Offset.
- Abdullah, S. (2013). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial. *Socius: Jurnal Sosiologi*, 12(1).
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Rajagrafindo Persada.
- Alfiansyah, R. (2022). Social capital as a BUMDes instrument in community empowerment in Sumbergondo Village, Batu City. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(1), 72–85.  
<https://doi.org/10.20473/jsd.v17i1.2022.72-85>
- Ambardi, M. U., & Prihawantoro, S. (2002). *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan*. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.
- Anas, A., Madani, M., & Tahir, N. (2020). *Efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. 1.
- Bagus, N. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 98–101.  
<https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226>
- Bungin, H. M. B. (2010). *Quantitative Research Methodology. (In Indonesian)*. Prenada Media Group.

- Dwijatenaya, I. B. M. A., Aini, Palinggi, Y., Musmuliadi, Narulita, S., & Wijayanti, S. K. (2024). Improving Community Welfare Through the Implementation of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Professional Business Review*, 9(4), 01–19.  
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i4.4378>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (Third Edit). Sage Publication, Inc.
- Johnson, B., & Christensen, L. (2008). *Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approache* (Third Edit). Sage Publication, Inc.
- Kerlinger, F. N. (2006). *Principles of Behavioral Research. (In Indonesian)*. Gadjah Mada University Press.
- Makmun. (2003). Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 7(2).  
*PP\_Nomor\_11\_Tahun\_2021.pdf*. (n.d.).
- Prawirokusumo, S. (2001). *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)*. BPFY-Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods (in Indonesian)*. CV. Alfabeta.

- Suharto, E. (2006). *Welfare State and Reinventing DEPSOS. (in Indonesian)*. IRE.
- Suyatna, H. (2018, July). *Badan Usaha Milik Desa*.  
<https://unwidha.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BUMDES-UNTUK-UNWIDHA-KLATEN.pdf>
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(2).
- Syukri, M., Hastuti, Akhmadi, Kartawijaya, & Kurniawan, A. (2014). *Studi Kualitatif Proliferasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan*.
- Torro, S., Gardono, I., & Rahman, A. (2014). *Integrasi Sosial dan Asimilasi: Simpul-Simpul Sosial Pada Masyarakat Majemuk di Indonesia*. Badan Penerbit UNM.
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijdjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo.
- Yamin, S. (2023). *Statistical Data Processing: SMARTPLS 3 SMARTPLS 4 AMOS & STATA [Easy & Practical] in Indonesian (E. III, Ed.)*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Yuliarmi, N. N. (2011). Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi Bali. *Jurnal Harian Regional*, 7(2).

Yuliarmi, N. N., Dunggio, M., & Yasa, I. N. M. (2020). Improving public welfare through strengthening social capital and cooperative empowerment. *Cogent Business & Management*, 2020(7), 1–13.

## LAMPIRAN

### 1. Jadwal Kerja

	Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pelaksanaan												
	a. Pengumpulan data sekunder (Kecamatan Dalam angka dan Kukar Dalam angka)												
	b. Pengumpulan data primer ke masing-masing kecamatan												
3.	Pengolahan data												
4.	Analisa												
5.	Pelaporan												

### 2. Personalia

No	Nama Lengkap	Bidang	Pria/Wanita	Unit Kerja
	Bidang Keahlian	Pendidikan Akhir (S1, S2, S3)	Alokasi Waktu (O/B)	Nama Lembaga
1.	Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, M.Si	S3	Pria	Faperta Unikara
	Ekonomi Pembangunan			
	Ketua/Koordinator Peneliti			
2.	Arista, SP., MP	S2	Wanita	Faperta Unikara
	Agribisnis			
	Anggota			
3.	Astik Drianti, SP., MP	S2	Wanita	Faperta Unikara
	Agribisnis			

	Anggota			
4	Elvida	S2	Wanita	Faperta Unikarta
	Agribisnis			
	Anggota			